

**PENYELENGGARAAN SATUAN RUANG PARKIR DI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (IMPLEMENTASI PERATURAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2012)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ANGGITA RACHMA DEWANTI

11340029

PEMBIMBING:

- 1. UDIYO BASUKI S.H., M.Hum.**
- 2. ISWANTORO S.H., M.H.**

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Kurang seimbangnya antara kebutuhan akan lahan parkir (*demand*) dan prasarana yang dibutuhkan (*supply*) menyebabkan banyaknya perparkiran liar yang tercipta di jalan-jalan yang laju pergerakannya sangat tinggi, selain itu bangunan ataupun lahan parkir di luar ruang milik jalan harusnya dapat memenuhi persyaratan untuk membangun lahan parkir di luar ruang milik jalan, tetapi masih banyak perparkiran di luar ruang milik jalan yang tidak mempunyai izin bahkan tidak memenuhi SRP yang sudah ditentukan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran dalam penyelenggaraan satuan ruang parkir di Jakarta dan untuk mengetahui hambatan maupun kendala dalam menyelenggarakan satuan ruang parkir dan bagaimana penyelesaiannya dilihat dari Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Jenis data yang dipergunakan meliputi data sekunder. Metode pengumpulan data normatif, karena penulis dalam penelitian ini mengkaji hukum tertulis yang berasal dari data sekunder. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif atau wawancara.

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan : (1) keberadaan Perda tersebut masih belum diimplementasikan secara maksimal, karena masih banyak perparkiran yang belum mempunyai izin menyelenggarakan perparkiran dan SRP yang belum memenuhi syarat di beberapa wilayah di DKI Jakarta; (2) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun masalah tersebut adalah : (a) Masih adanya pengelolaan parkir tanpa izin yang biasanya dikuasai oleh preman atau ormas setempat; (b) Terbatasnya lahan parkir *off street*, sedangkan pengguna jasa parkir tepi jalan umum selalu bertambah sehingga menghambat kelancaran lalu lintas; (c) Masih terbatasnya pengetahuan mengenai perizinan parkir maupun peraturan-peraturan tentang parkir dari aparat Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran kepada masyarakat khususnya para pengelola parkir. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut UP Perparkiran DKI Jakarta melakukan langkah-langkah adalah : (a) mengadakan operasi secara rutin guna mengantisipasi para pengelola parkir dan petugas parkir yang nakal / liar yang sering menaikkan tarif parkir di tepi jalan umum; (b) Merencanakan dan membuka lahan parkir baru sehingga parkir di tepi jalan umum tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas; (c) Mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara preventif untuk semua pihak pengelola parkir dan petugas parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran secara rutin dan periodik.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggita Rachma Dewanti

NIM : 11340029

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Penyelenggaraan Satuan Ruang Parkir di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Implementasi Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2012)” adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Jumadil Awal 1436 H

20 Maret 2015

Yang Menyatakan



Anggita Rachma Dewanti

NIM. 11340029



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Anggita Rachma Dewanti

NIM : 11340029

Judul : Penyelenggaraan Satuan Ruang Parkir di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Implementasi Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2012)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Maret 2015

Pembimbing I

Udiyo Basuki S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Anggita Rachma Dewanti

NIM : 11340029

Judul : Penyelenggaraan Satuan Ruang Parkir di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Implementasi Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2012)

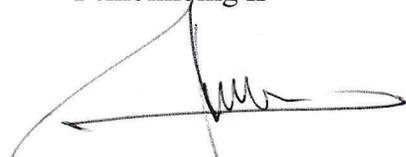
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Maret 2015

Pembimbing II



Iswantoro S.H., M.H.

NIP. 19661010-199202 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/226/2015

Skripsi dengan Judul: Penyelenggaraan Satuan Ruang Parkir di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Implementasi Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2012)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Anggita Rachma Dewanti

NIM : 11340029

Telah dimunaqasyahkan pada: 05 Mei 2015

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Udiyo Basuki S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Dr. Siti Fatimah S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

M. Misbahul Mujib S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002



Yogyakarta, 29 Januari 2015
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 1997031 003

MOTTO

"I can do anything if I have an enthusiasm, enthusiasm is the yeast that makes your hope rise to the stars" (Henry Ford)

"Don't be afraid of life! How good life is when you do something good and rightful!" (Dostoevsky's; The Brother Karamazou : 9 Summer 10 Autumn)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada

- ❖ *Mulyati* , terimakasih sudah memberikan segalanya buat anggi mah, kasih sayang, doa dan kesabaran yang tidak ada habisnya untuk anggi.
- ❖ *Herry Wibowo* , terimakasih atas kasih sayang, perhatian dan doamu tidak pernah putus untukku, sasa dan mamah ya pah.
- ❖ *Saras Wulasih Febrini*, terimakasih sudah menjaga mamah dengan baik selama mba anggi di jogja, keberhasilan ini untukmu juga sa, semoga kamu menjadi adik yang hebat nantinya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده

لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين

Segala puji bagi Allah, SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah serta karunia-Nya kepada seluruh umat di dunia. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

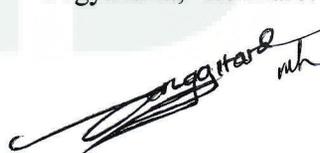
Berkat limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Namun penyusun menyadari bahwa kelancaran dalam menyusun skripsi ini tidak lain adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Ach.Tahir, S.H.I.,S.H.,LL.M.,M.A., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

5. Bapak Iswantoro S.H.,M.H., selaku Dosen pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu kepada penyusun.
7. Zindi Setiya A.M S.H dan Tri Rahayu S.H, jika tidak ada kalian entah jadi apa aku di jogja ini, terimakasih untuk semua support dan kasih sayang kalian yang tidak pernah putus.
8. Toro, Mami Zakaria, Gope, Kaka Diah, Sunna dan Nuzul terimakasih sudah menjadi teman yang baik menemani hari-hari revisi ku yang indah.
9. GD, selalu membuatku semangat dalam segala hal.
10. Memey, Emon, Mba UI, Erte Arin, Riris, dan Napol, terimakasih untuk kalian teman hidup yang selalu membuatku bahagia dan tertawa setiap saat.
11. Ilmu Hukum angkatan 2011 kalian adalah keluargaku, gracias.
12. Trah Suski, terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu mengalir untukku dan keluarga.

Dalam Penulisan skripsi ini penyusun menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 20 Maret 2015



Penyusun

Anggita Rachma Dewanti

11340029

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iv |
| PENGESAHAN SKRIPSI | vi |
| MOTTO..... | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 6 |
| D. Telaah Pustaka..... | 7 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 18 |
| BAB II TINJAUAN TENTANG PERPARKIRAN DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PERSPEKTIF PEMERINTAH DAERAH | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah..... | 20 |
| B. Tinjauan Umum Perparkiran..... | 30 |

| | |
|--|----|
| C. Tinjauan Umum Rencana Tata Ruang Wilayah..... | 45 |
|--|----|

**BAB III SISTEM PENYELENGGARAAN SATUAN RUANG PARKIR DI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

| | |
|---|----|
| A. Deskripsi Wilayah Penelitian..... | 50 |
| B. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di DKI Jakarta..... | 59 |
| C. Sistem Penyelenggaraan Parkir..... | 63 |

**BAB IV ANALISIS PENYELENGGARAAN SATUAN RUANG
PARKIR DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

| | |
|--|----|
| A. Implementasi Penyelenggaraan Satuan Ruang Parkir..... | 69 |
| B. Hambatan Dalam Penyelenggaraan Satuan Ruang Parkir di DKI Jakarta | 98 |

BAB V PENUTUP

| | |
|-----------------------------|------------|
| A. Kesimpulan | 108 |
| B. Saran | 111 |
| DAFTAR PUSTAKA | 113 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perparkiran bukanlah suatu fenomena yang baru. Perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Di banyak kota baik di kota-kota besar maupun kota-kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah perparkiran, khususnya untuk kendaraan roda 4. Masalah perparkiran tersebut akhir akhir ini terasa sangat mempengaruhi pergerakan kendaraan, dimana kendaraan yang melewati tempat-tempat yang mempunyai aktivitas tinggi laju pergerakannya akan terhambat oleh kendaraan yang parkir di badan jalan, sehingga hal ini dapat menyebabkan kemacetan. Dalam usaha menangani masalah tersebut, maka diperlukan pengadaan lahan parkir yang cukup, dan penentuan bentuk permodelan parkir yang tepat pada lahan parkir yang ada, dimana kebutuhan akan lahan parkir (*demand*) dan prasarana yang dibutuhkan (*supply*) haruslah seimbang dan disesuaikan dengan karakteristik perparkiran, selain itu bangunan ataupun lahan parkir di luar ruang milik jalan harusnya dapat memenuhi persyaratan untuk membangun lahan parkir di luar ruang milik jalan. Tetapi masih banyak perparkiran di luar ruangmilik jalan yang tidak mempunyai izin bahkan tidak memenuhi SRP yang sudah ditentukan.

Dari data yang ada di DKI Jakarta terdapat 25,7 juta perjalanan perharinya, dengan jumlah perjalanan motor lebih mendominasi yaitu 50,8%, mobil 23,9%, dan angkutan umum yaitu sebanyak 25,3% hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang semakin meningkat di enam tahun terakhir ini dari tahun 2006 sampai tahun 2013 kendaraan bermotor di DKI Jakarta meningkat hingga 8,12% per tahunnya. Seperti diketahui, pertumbuhan jalan yang dibutuhkan di Jakarta yaitu 41,68 km² dan Road ratio 6,3% dari luas wilayah DKI Jakarta sedangkan pertumbuhan panjang jalan hanya 0,01% per tahun, hal ini tidak sebanding dengan kebutuhan perjalanan di Jakarta yang mencapai 25,7 juta per hari.¹

Melihat kenyataan di atas tentunya muncul berbagai problematika mengenai jalan ataupun kendaraan tersebut, dengan keadaan yang sangat tidak seimbang tersebut mengenai jumlah kendaraan dan kapasitas jalan yang tidak seimbang menyebabkan berbagai, sejumlah warga DKI Jakarta sering menyampaikan keluhan atas situasi politik dan keamanan di Ibukota.²

Parkir sendiri diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.³ Di banyak kota-kota besar maupun

¹ Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dalam Angka Tahun 2013, hlm.8.

² Tim Peneliti *Centre For Political Studies* Soegeng Sarjadi Syndicated, *Otonomi Potensi Masa Depan Republik Indonesia*, Jakarta :PT.Gramedia, 2001, hlm.28.

³ Lihat Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk Umum di Luar Badan Jalan. Pasal 1.

kota-kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah perparkiran, seperti kendaraan yang parkir secara liar di badan jalan, sehingga hal ini dapat menyebabkan kemacetan. Parkir di luar badan jalan juga sering ditemukan beberapa masalah, seperti bangunan parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada seperti RTRW maupun AMDAL juga masih adanya usaha parkir di luar badan jalan yang belum mempunyai izin. Untuk urusan parkir di luar badan jalan seperti itu, seringkali ada pihak yang mengatas namakan juru parkir resmi dari Pemerintah Daerah. Kendati belakangan diketahui banyak juru parkir ini beroperasi secara illegal, para penyelenggara parkir illegal ini tentunya sudah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 21 yang berisi tentang “Setiap badan usaha yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Gubernur.” Dalam UU ini juga mengatur tentang bagaimana para penyelenggara parkir mendapatkan perizinan, peraturannya tertera pada Pasal 22 Perda No 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran (1) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, penanggung jawab badan usaha harus mengisi permohonan izin penyelenggaraan parkir dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis. (2) Bagi penyelenggaraan usaha parkir murni harus melampirkan hasil analisis dampak lalu lintas yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan. (3) penyelenggara usaha parkir harus memenuhi ketentuan pelaksanaan *on-line system* Pajak Daerah.

Menurut PERDA No.5 Tahun 2012 tentang Perparkiran pasal 4 fasilitas parkir dibagi dua yaitu:

- a. Perparkiran di luar ruang milik jalan; dan
- b. Perparkiran di ruang milik jalan.

Pasal 6 (1) Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa:

- a. gedung parkir murni;
- b. gedung parkir pendukung;
- c. pelataran *I* taman parkir murni; dan/ atau
- d. pelataran *I* taman parkir pendukung.

(1) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kolektor dan jalan local berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian parkir. (2) Penggunaan sebagaimana Gubernur ruang milik jalan untuk dimaksud pada ayat (1) fasilitas parkir ditetapkan oleh (3) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari UP Perparkiran.⁴

Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang perparkiran yang sudah mengatur tentang parkir sseharusnya sudah jelas apa-apa saja yang diatur dalam peraturan tersebut, tetapi bagaimana implementasinya di

⁴ Lihat Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran di DKI Jakarta. Pasal 11 ayat (1)

dalam masyarakat ataupun badan penyelenggara satuan ruang parkir tersebut, lalu berbagai kendala yang ada dalam penyelenggaraan satuan ruang parkir itu sendiri.

Sehubungan dengan masalah di atas mengenai implementasi dari perda yang ada dan mengenai kendala maupun hambatan dalam penyelenggaraan satuan ruang parkir tersebut terutama di kota-kota besar seperti di DKI Jakarta. Oleh karenanya penyusun mengambil judul Penyelenggaraan Satuan Ruang Parkir di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012) yang diharapkan, dari penelitian ini dapat diketahui dan dipahami dengan jelas bagaimana Kendala ataupun hambatan dalam penyelenggaraan perparkiran di Jakarta dan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran di DKI Jakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penyelenggaraan satuan ruang parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran di DKI Jakarta?
2. Kendala apa saja yang ditemui dalam penyelenggaraan satuan ruang parkir di DKI Jakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran dalam penyelenggaraan satuan ruang parkir di Jakarta
- b. Untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi kendala dalam menyelenggarakan satuan ruang parkir dan bagaimana penyelesaiannya dilihat dari Perda No 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran di DKI Jakarta.

2) Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini target yang diharapkan adalah memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

a. Secara teoritis:

Diharapkan hasil penelitian ini kelak dapat menyumbangkan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya bidang hukum Tata Negara terutama yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah.

b. Secara praktis:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kejelasan dari pengaturan penyelenggara satuan ruang parkir serta fasilitas satuan ruang parkir di DKI Jakarta dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran di DKI Jakarta.

2. Untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan dan pengetahuan penyusun, sudah banyak ditemukan penelitian dan tulisan (skripsi) yang membahas tentang perparkiran. Berkaitan dengan penyusunan skripsi ini, ada beberapa skripsi yang dijadikan pedoman antara lain:

Skripsi Muhamad Yusuf berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Perparkiran di Wilayah Kota Yogyakarta”⁵ pada skripsi ini diuraikan tentang bagaimana akad dan pelaksanaan pengelolaan perparkiran secara umum. Muhamad Yusuf juga mengemukakan bahwa dengan adanya suatu akad akan ada timbul suatu kejelasan dalam melakukan kesepakatan suatu perjanjian. Dalam hal ini akan memberikan pengaruh terhadap pihak-pihak yang dirugikan dan ada pula pihak yang diuntungkan dalam akad tersebut.

Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian Muhamad Yusuf yaitu adalah dalam skripsi ini membahas tentang pengelolaan perparkiran di wilayah kota Yogyakarta ditinjau dari hukum Islam serta yang menjadi objek

⁵ Muhammad Yusuf, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Perparkiran di Wilayah Kota Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

penelitian Muhamad Yusuf lebih mengarah pada tinjauan hukum Islamnya dan lokasi penelitiannya pun di Yogyakarta. Persamaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya yaitu meneliti tentang pengelolaan atau penyelenggaraan perparkiran.

Skripsi Kurniadi Nugroho berjudul “Penggunaan Ulang Bukti Retribusi Parkir di Jl. Affandi Sleman Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”⁶ menguraikan tentang apa yang melatarbelakangi terjadinya pelaksanaan penggunaan ulang bukti retribusi parkir dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan penggunaan ulang retribusi parkir tersebut.

Perbedaan dari skripsi yang disusun oleh Kurniadi Nugroho ini terletak pada objek penelitiannya yang lebih mencakup tentang bukti retribusi parkir dan pada skripsi Kurniadi Nugroho ini lebih mengarah pada implementasi sosiologi hukum Islamnya.

Buyung Ari Rusnandi dalam skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran (Studi Pelaksanaan Perda Yogyakarta No.18 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Perparkiran)”⁷

⁶ Kurniadi Nugroho, “Penggunaan Ulang Bukti Retribusi Parkir di Jl.Affandi Sleman Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”, Skripsi Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

⁷ Buyung Ari Rusnandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran (Studi Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggara Perparkiran)”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

dalam skripsi penyusun membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap tanggung jawab pengelola jasa perparkiran dalam melaksanakan peraturan daerah kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009 tentang penyelenggara perparkiran.

Thesis Tadjudin Satriono, M. Mustam yang berjudul “Studi Implementasi Perda No.1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi tentang Pelayanan publik di Kota Semarang).”⁸ Membahas tentang penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum. peneelitan ini tidak hanya meneliti tentang pemasukan ke kas daerah, namun juga bentuk perwujudan pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang.

Thesis karya Subur Wijono,S.H yang berjudul “Ganti Kerugian Kehilangan Sepeda Motor yang Dititipkan (Studi Kasus pada Matahari Mall dan Bandara Ahmad Yani Semarang).”⁹ Yang membahas hukum keperdataannya yaitu membahas tentang penyelesaian ganti rugi atas adanya kehilangan kendaraan bermotor yang di inapkan di area parkir suatu tempat

⁸ Tadjudin Satriono, “Studi Implementasi Perda No.1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi Tentang Pelyanan publik di Kota Semarang)”, skripsi Faculty of Social and Political Science Universitas Diponegoro (2010).

⁹ Subur Wijono .“Ganti Kerugian Kehilangan Sepeda Motor yang Dititipkan (Studi Kasus pada Matahari Mall dan Bandara Ahmad Yani Semarang). Skripsi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2007).

perbelanjaan. Dan membahas tentang kebebasan kontrak dalam penitipan kendaraan bermotor tersebut.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum merupakan objek studi yang selalu actual untuk dikaji, perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah penyebab munculnya rumusan.¹⁰ Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga yang menyebutkan, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Karena Negara Indonesia merupakan Negara hukum, tiap tindakan penyelenggaraan Negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang telah diadakan lebih dahulu merupakan batas kekuasaan penyelenggaraan Negara. Undang-undang Dasar yang memuat norma-norma umum dan peraturan-peraturan hukum harus ditaati, oleh pemerintah atau badan-badannya sendiri.

Negara hukum adalah Negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Yaitu segala kesewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain

¹⁰ Jazim Hamidi, dkk. *Teori Hukum Tata Negara A Turning Point of The State*. (Jakarta: Salemba Humanika:2012), hlm.143.

diatur oleh hukum, hal demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹¹

2. Teori Demokrasi

Negara hukum harus ditopang dengan sistem Demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Negara-negara yang demokratis akan melahirkan pula hukum-hukum yang berwatak demokratis, sedangkan Negara-negara yang otoriter atau non demokratis akan lahir hukum-hukum yang non demokratis. Dalam sistem demokrasi tanpa pengaturan, hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas Negara hukum.¹²

3. Teori Kewenangan

Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat

¹¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, cet. ke-6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.88.

¹² Munthoha, *Negara Hukum Indonesia, Pasca Perubahan Undang-Undang 1945*, cet ke-1 (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hlm.3.

diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara (F.P.C.L.Tonner).¹³

Unsur kewenangan itu sendiri meliputi: 1). Pengaruh yang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. 2). Dasar Hukum yang mana wewenang itu selalu harus ditunjuk dasar hukumnya. 3). Konformitas Hukum mengandung makna adanya standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Setiap wewenang itu dibatasi oleh isi/materi, wilayah/ruang, dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat wewenang atau dalam artian bahwa di luar-luar batas itu suatu tindakan pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*ombevoegheid*).¹⁴

4. Teori Tindakan Pemerintah

Menurut Van Vollenhoven yang dimaksudkan yang dimaksudkan dengan tindakan pemerintahan adalah pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendahan. Sedangkan menurut komisi *Van Poelje* dalam laporannya tahun 1972 yang dimaksudkan dengan “publiek rechtelijke handeling” atau tindakan dalam hukum publik adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Romeijn mengemukakan bahwa tindakan pemerintahan adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari satu alat

¹³ Ridwan,HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers,2006), hlm.100.

¹⁴ *Ibid*, hlm.100

administrasi negara yang mencakup juga perbuatan atau hal-hal yang berbeda di luar lapangan hukum tata pemerintahan, seperti keamanan, peradilan dan lain-lain dengan maksud menimbulkan akibat hukum dalam bidang umum administrasi.¹⁵

5. Teori Otonomi Daerah

Otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus di pertanggungjawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu: adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

¹⁵ SF.Marbun dan Moh.Mahfud. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, cet.ke-5 (Yogyakarta: Liberty,2006), hlm.70.

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat penyusun uraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan Peraturan-Peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif. Sedangkan pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah, dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita yang ada di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di dua wilayah DKI Jakarta, yaitu Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Alasan dipilihnya wilayah tersebut sebagai objek penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Analisa terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran

¹⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1

- b. Serta analisa hambatan atau kendala tentang perparkiran di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Perda tersebut.

3. Jenis Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian, penyusun menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu, suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari responden atau narasumber (*field research*), yakni berupa:

- 1) Kondisi wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang menyangkut letak geografi, potensi wilayah dan lain sebagainya.
- 2) Kondisi mengenai perizinan penyelenggaraan perparkiran di DKI Jakarta
- 3) Upaya pemerintah daerah dalam mengawasi masalah perparkiran di DKI Jakarta
- 4) Pengaturan mengenai Satuan Ruang Parkir di DKI Jakarta

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu suatu data yang di dapatkan dari hasil penelitian pustaka (*librry research*). Data sekunder yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini selain Undng-Undang adalah peraturan yang otoritsnya dibawah Undang-Undang yakni, Peraturan Daerah Provinsi.

Peraturan Daerah Provinsi yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara untuk mengumpulkan data, penyusun lakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Sebagai langkah pertama dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung ke Dinas Perhubungan dan Unit Pengelola Perparkiran di DKI Jakarta.

b. Wawancara

Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber, yakni dengan kepala pelayanan/perizinan UP Perparkiran DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

c. Dokumentasi

Langkah terakhir adalah dokumentasi, yaitu mencari data atau variabel yang berupa peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, laporan penelitian, buku, catatan, dan dokumen lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut, penyusun mempergunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni satu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil kesimpulan.¹⁷

G. Sitematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penyusun membagi bahasan dalam lima bab, yakni sebagai berikut:

Diawali dengan bab pertama, berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan tentang perparkiran dan rencana tata ruang wilayah perspektif pemerintah daerah.

Bab ketiga, berisi tentang analisis penyelenggaraan satuan ruang parkir di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bab keempat, penyusun menganalisa bagaimana implementasi penyelenggaraan perparkiran dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta

¹⁷ *Ibid*, hlm.229.

Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran sudah sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan menjabarkan satu persatu materi muatan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tersebut, kemudian menganalisis apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan satuan ruang parkir di Provinsi DKI Jakarta perspektif Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran

Bab kelima merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan ditutup dengan saran-saran dan keterbatasan-keterbatasan untuk menjelaskan hambatan dan tantangan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, merupakan salah satu pendukung terciptanya suatu lahan parkir yang layak dan salah satu upaya dalam meminimalisir kemacetan akibat parkir di ruang milik jalan. Dari sebagian permasalahan tersebut pada dasarnya peran Perda ini sendiri masih belum terlaksana secara maksimal di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur karena masih banyak berbagai badan usaha yang masih belum mempunyai lahan parkir sehingga mereka masih menggunakan ruang jalan sebagai tempat parkir keadaan tersebut pastinya sangat mempengaruhi kondisi lalu lintas di daerah tersebut. Mengenai Penyelenggaraan perparkiran di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan periode bulan desember 2014 juga bisa membandingkan bahwa Jakarta Selatan lebih mendominasi Jakarta Timur dalam lahan perparkiran, meski sedikit tapi penerapan Perda tersebut masih sangat kurang di wilayah Jakarta Timur karena masih banyak pula yang belum mempunyai izin menyelenggarakan perparkiran di luar ruang milik jalan di wilayah tersebut. Hal ini menjadi salah satu persoalan laju lalu lintas di Jakarta Selatan maupun Jakarta Timur karena masih

banyak sarana perparkiran yang belum mempunyai izin dan lahan parkir tersebut juga tidak memenuhi standarisasi SRP DKI Jakarta.

2. Sedangkan kendala yang ditemui dalam penyelenggaraan satuan ruang parkir di DKI Jakarta adalah:

- a. Masih adanya pengelolaan parkir tanpa izin yang biasanya dikuasai oleh preman atau ormas setempat tanpa mementingkan pengaturan satuan ruang parkir sehingga mengganggu para pengguna parkir.
- b. Terbatasnya lahan parkir *off street*, sedangkan pengguna jasa parkir tepi jalan umum selalu bertambah sehingga menghambat kelancaran lalu lintas.
- c. Masih terbatasnya pengetahuan mengenai perizinan parkir maupun peraturan-peraturan tentang parkir dari aparat Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran kepada masyarakat khususnya para pengelola parkir.
- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mentaati peraturan perundang-undangan yang diberlakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran sehingga sering terjadi pelanggaran terhadap tata tertib yang ditetapkan.
- e. Dari hasil pengamatan yang dilakukan banyak lokasi parkir yang memanfaatkan trotoar sehingga mengganggu pedestrian.

Cara Mengatasi kendala di atas adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan operasi secara rutin yang dilakukan oleh Polisi, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran guna mengantisipasi para pengelola parkir dan petugas parkir yang nakal / liar yang sering menaikkan tarif parkir di tepi jalan umum.
- b. Merencanakan dan membuka lahan parkir baru sehingga parkir di tepi jalan umum tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
- c. Mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara preventif untuk semua pihak pengelola parkir dan petugas parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran secara rutin dan periodik, sehingga segala permasalahan dapat diatasi untuk memberikan pengertian-pengertian guna kelancaran tugas di bidang perparkiran dan tugas lain misalnya masalah perizinan, keamanan dan ketertiban di lokasi penyelenggaraan tempat khusus parkir.
- d. Membentuk tim administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran yang mana dibentuk dengan Surat Keputusan atau Surat Perintah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dengan tujuan agar administrasi misalnya penerimaan setoran, pengeluaran, pengarsipan di tubuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dikerjakan secara tertib dan optimal sehingga terwujud manajemen tertib dan lancar atas pengendalian dan pengelolaan tempat parkir di

tepi jalan umum maupun di tempat penyelenggaraan tempat khusus parkir.

B. Saran

1. Keberhasilan DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan perparkiran dan lalu lintas dari kemacetan akibat parkir liar di ruang milik jalan dan para oknum yang tidak bertanggung jawab dalam membangun perparkiran di luar ruang milik jalan tidak luput dari peran penegak hukum yang profesional. Alangkah baiknya untuk menghindari kerugian atau pungutan liar yang terjadi di berbagai penyelenggaraan parkir di DKI Jakarta maka penegak hukum perlu melakukan pengendalian secara terprogram supaya tidak lagi muncul lahan-lahan atau bangunan parkir yang tidak mempunyai izin dan tidak memenuhi standarisasi pelayanan parkir di DKI Jakarta.
2. Penegak hukum harus lebih teliti lagi dalam menegakkan Perda No 5 Tahun 2012, Perlu kiranya dilakukan razia secara terprogram dari pihak Unit Pengelola Parkir DKI Jakarta bekerjasama dengan pihak DLLAJR setempat bukan hanya pada parkir liar di ruang milik jalan saja, dan perlu adanya peringatan ataupun sanksi yang keras terhadap penyelenggaraan parkir yang lebih tegas di petugas Satpol PP dan kepolisin wilayah tersebut di luar ruang milik jalan yang tidak mempunyai izin dan tidak

memenuhi standarisasi keamanan parkir di luar ruang milik jalan itu sendiri. Sehingga para pengguna parkir dapat lebih nyaman memarkirkan kendaraannya.

3. Melakukan perubahan pada perda mengenai penyelenggaraan parkir di ruang milik jalan yang perlahan sudah mulai ditiadakan, dan penambahan lahan parkir di luar ruang milik jalan agar supaya lebih ditingkatkan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran

Peraturan Daerah No.16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.

Pergub DKI Jakarta No 72 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Parkir

Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran

Pergub No.120 Tahun 2012 tentang biaya parkir pada penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.42 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta..

Dinas Perhubungan Prov.DKI Jakarta.Dinas Perhubungan dalam angka Tahun 2013.

Sumber UP Perparkiran DKI Jakarta

B. Buku

Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad,MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010).

Hamidi, Jazim dkk, *Teori Hukum Tata Negara A Turning Point of The State*. (Jakarta: Salemba Humanika:2012).

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara*,cet.ke-6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Huda, Ni'matul, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah, Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, cet.ke-1(Yogyakarta: UII Press, 2007).

Huijbers, Theo, *Filsafat hukum*, cet ke-3 (Yogyakarta: Kanisius,1995).

Munthoha, *Negara Hukum Indonesia,Pasca Perubahan Undang-Undang 1945*, cet ke-1 (Yogyakarta: Kaukaba,2013).

Nugroho, Kurniadi, "*Penggunaan Ulang Bukti Retribusi Parkir di Jl.Affandi Sleman Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*", Skripsi Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)

Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Rajawali Pers,2006).

Rusnandi Ari, Buyung, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran (Studi Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggara*

Perparkiran)”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Satriono, Tadjudin, “*Studi Implementasi Perda No.1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi Tentang Pelyanan publik di Kota Semarang)*”, skripsi Faculty of Social and Political Science Universitas Diponegoro (2010).

SF.Marbun dan Moh.Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, cet.ke-5 (Yogyakarta: Liberty,2006).

Siti Fatimah dan Nurainun Mangunsong, *Panduan Praktikum Legal Drafting*, cet.ke-1(Yogyakarta: Suka Press, 2012).

Suratman, *Metodologi penelitian hukum*, cet.ke-1 (Bandung : Alfabeta,2012).

Tim Peneliti Centre For Political Studies Soegeng Sarjadi Syndicated, *Otonomi Potensi Masa Depan Republik Indonesia*, Jakarta :PT.Gramedia, 2001.

Wijono, Subur, “*Ganti Kerugian Kehilangan Sepeda Motor yang Dititipkan (Studi Kasus pada Matahari Mall dan Bandara Ahmad Yani Semarang)*”. *Skripsi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2007)*.

Yusuf, Muhammad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Perparkiran di Wilayah Kota Yogyakarta*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

C. Internet

<http://dishub.jakarta.go.id/>. 16 Januari 2015. Pukul 15:30 WIB

<http://selatan.jakarta.go.id/> . Februari 2015

<http://pemda.jatimkota.net/> . Februari 2015

D. Lain-lain

Wawancara Kirdi kepala subbag pelayanan UPP Perparkiran Prov.DKI

Jakarta

Wawancara Suparto Kepala subbag keuangan UPP Perparkiran Prov.DKI

Jakarta





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840,
Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 4303 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 26 November 2014

Kepada
Yth. Gubernur D.I Yogyakarta
C.q. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan D.I Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

| No. | Nama | NIM | JURUSAN/PRODI |
|-----|------------------------|----------|-----------------|
| 1. | Anggita Rachma Dewanti | 11340029 | ILMU HUKUM (IH) |

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Perhubungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul : IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN SATUAN RUANG PARKIR DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dr. H. Kamsi, MA.
15570207 198703 1 003 7

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Desember 2014

Nomor : 074/2608/Kesbang/2014
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur DKI Jakarta
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi DKI Jakarta
Di

JAKARTA.

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.09/4303/2014
Tanggal : 26 November 2014
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN SATUAN RUANG PARKIR DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (PERSEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012)", kepada :

Nama : ANGGITA RACHMA DEWANTI
NIM : 11340029
C.P : 085717985718
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunankalijaga Yogyakarta
Lokasi : DKI Jakarta
Waktu : Desember 2014 s.d Mei 2015

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan;



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN

UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN

Jalan Perintis Kemerdekaan I No. 1 Pulomas
Telp. 4712053, 4712058 Fax. (021) 4701712
Jakarta

Kode Pos : 13210

SURAT KETERANGAN

Nomor : 159/1.811.A

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/4303/2015, tanggal 17 Januari 2015 perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANGGITA RACHMA DEWANTI
N.I.M. : 11340029
Bidang Minat : Ilmu Hukum (IH)

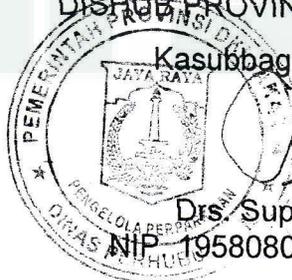
Bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan penelitian/riset di Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN SATUAN RUANG PARKIR DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012).

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 Februari 2015

An . KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

Kasubbag Keuangan



Drs. Suparto, MSi

NIP. 195808051977101001

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan perparkiran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran baik dalam berlalu lintas maupun pengguna jasa parkir, maka parkir harus dikelola secara terpadu dalam satu kesatuan sistem transportasi dan dilaksanakan sesuai kedudukan dan peran Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran sebagaimana pada huruf a perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan perparkiran saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perparkiran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3530);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1986 Nomor 91);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 76);
26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 87);
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2);

32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Pengelola Perpustakaan, yang selanjutnya disebut dengan UP.Perpustakaan adalah Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
8. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau sepeda.
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.
14. Perparkiran adalah hal ihwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir.
15. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
16. Pengguna jasa parkir adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan satuan ruang parkir.
17. Rambu parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
18. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi kepentingan pengguna jasa parkir.
19. Penyelenggara parkir adalah Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang diberi izin menyelenggarakan parkir yang memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.
20. Pengelola parkir adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran.
21. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
22. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat dengan SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
23. Rencana tata ruang wilayah, yang selanjutnya disingkat dengan RTRW, adalah rencana tata ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24. Tarif layanan parkir adalah imbalan atas jasa layanan parkir yang dijual dan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
25. Penitipan kendaraan ialah area atau kawasan yang khusus diperuntukan bagi penitipan kendaraan dalam jangka waktu tertentu yang terpisah dari areal parkir umum.
26. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan

- pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
27. Standar Pelayanan Minimum Parkir yang selanjutnya disebut SPM parkir adalah jenis dan mutu pelayanan dasar dari penyelenggaraan parkir yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa parkir secara minimal.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran;
- e. terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- f. terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan asli daerah dibidang perparkiran.

BAB III FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Fasilitas parkir terdiri atas:

- a. di luar ruang milik jalan; dan
- b. di ruang milik jalan.

Pasal 5

- (1) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dikelola oleh:
 - a. Pemerintah Daerah sebagai penyusun regulator; dan
 - b. Badan Usaha sebagai penyelenggara.
- (2) Pengelolaan parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola oleh UP. Perparkiran dengan penyusunan dan pengendalian regulasi perparkiran.
- (3) Pengelolaan fasilitas parkir oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri atau untuk menunjang kegiatan dan/atau usaha pokok dengan pengadaan dan penyelenggaraan fasilitas parkir.

Bagian Kedua

Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 6

- (1) Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa:
 - a. gedung parkir murni;
 - b. gedung parkir pendukung;
 - c. pelataran / taman parkir murni; dan/atau
 - d. pelataran / taman parkir pendukung.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir murni dan/atau pelataran/taman parkir murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan yang terintegrasi dengan moda angkutan massal.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (3) Kerja sama penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukan untuk kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan SRP.

- (2) Apabila penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memungkinkan dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan fasilitas parkir secara kolektif atau bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
 - d. kelestarian lingkungan;
 - e. kemudahan bagi pengguna jasa parkir;
 - f. aksesibilitas penyandang disabilitas; dan
 - g. memenuhi SRP minimal.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Fasilitas Parkir di Ruang Milik Jalan

Pasal 11

- (1) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kolektor dan jalan lokal berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian parkir.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari UP Perparkiran.

Pasal 12

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib memperhatikan:

- a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukkan lahan sekitarnya; dan
 - f. peranan jalan bersangkutan.
- (2) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk lingkungan parkir.
 - (3) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dimaksud pada ayat (1), dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu parkir.

Pasal 13

- (1) Fasilitas parkir di ruang milik jalan berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas :
 - a. golongan A; dan
 - b. golongan B.
- (2) Kawasan (*zoning*) pengendalian parkir golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. frekuensi parkir relatif tinggi;
 - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. derajat kemacetan lalu lintas tinggi.
- (3) Kawasan (*zoning*) pengendalian parkir golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. frekuensi parkir relatif rendah;
 - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. derajat kemacetan lalu lintas rendah.

Pasal 14

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), wajib dievaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Gubernur wajib melarang penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dengan memberikan rambu larangan parkir dan disampaikan kepada masyarakat melalui media.

Pasal 15

- (1) Gubernur meniadakan penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), apabila:

- a. mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 - b. di ruas jalan tersebut tersedia gedung parkir dan/atau taman parkir sesuai jangkauan dan kapasitas satuan ruang parkir yang tersedia; dan/atau
 - c. di ruas jalan tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), harus ditiadakan secara bertahap dan tersistematis.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Gubernur.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur harus menempatkan Petugas Satpol PP sesuai kebutuhan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Fasilitas Parkir Khusus

Pasal 18

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan fasilitas parkir untuk:
 - a. penyandang disabilitas atau nama lain;
 - b. orang lanjut usia;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. sepeda.
- (2) Fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu parkir utama;
 - b. mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan;
 - c. disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas; dan
 - d. parkir khusus ditandai dengan simbol tanda parkir.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara parkir dapat menyediakan fasilitas parkir berupa parkir vallet.

- (2) Fasilitas parkir vallet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. jumlah SRP yang disediakan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total keseluruhan SRP yang dikelola oleh penyelenggara usaha parkir;
 - b. parkir khusus vallet ditandai dengan simbol tanda parkir;
 - c. pelaksanaan parkir vallet dapat dilaksanakan oleh operator parkir atau badan usaha lain yang ditunjuk oleh penyelenggara parkir; dan
 - d. penyelenggara parkir yang melaksanakan parkir vallet wajib mengajukan permohonan izin kepada Gubernur.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENYELENGGARA PARKIR

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 21

- (1) Setiap badan usaha yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. izin penyelenggaraan parkir dengan memungut biaya parkir; dan
 - b. izin penyelenggaraan parkir dengan tidak memungut biaya parkir.

Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, penanggungjawab badan usaha harus mengisi permohonan izin penyelenggaraan parkir dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Bagi penyelenggaraan usaha parkir murni harus melampirkan hasil analisis dampak lalu lintas yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) penyelenggara usaha parkir harus memenuhi ketentuan pelaksanaan *on-line system* Pajak Daerah.

Pasal 23

- (1) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Gubernur.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung jawab

Pasal 25

- (1) Penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan ke dan dari fasilitas parkir dengan menempatkan sarana parkir dan/atau menempatkan petugas parkir.
- (2) Dalam mengawasi, menjamin keamanan, dan menertibkan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara parkir dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Penyelenggara parkir wajib menyediakan fasilitas parkir sepeda motor dan sepeda berdasarkan satuan ruang parkir.

Pasal 26

Setiap pelaku kegiatan dan/atau usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas parkir dan menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir, wajib bekerja sama dengan penyelenggara parkir terdekat.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan karcis atau sticker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Pengenaan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan lama penggunaan satuan ruang parkir.

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara parkir umum di luar ruang milik jalan wajib mengasuransikan kendaraan yang parkir di SRP yang menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir.

- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung hilangnya kendaraan dan kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan.

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menerapkan SPM Perparkiran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

Penyelenggara parkir bertanggungjawab atas:

- a. kendaraan yang parkir di SRP yang disediakan;
- b. memenuhi kewajiban atas pajak parkir;
- c. menyediakan informasi parkir, biaya parkir, rambu parkir, dan sarana parkir;
- d. menyediakan pakaian seragam bagi Petugas Parkir;
- e. menjaga keamanan dan ketertiban di fasilitas parkir; dan
- f. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan fasilitas parkir.

Pasal 31

Penyelenggara parkir dilarang menyediakan fasilitas parkir sebagai berikut:

- a. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- c. sepanjang 50 m (lima puluh meter) sebelum dan sesudah jembatan;
- d. sepanjang 100 m (seratus meter) sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- e. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah persimpangan;
- f. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah akses bangunan gedung; dan
- g. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Bagian Ketiga

Karcis Parkir

Pasal 32

- (1) Karcis parkir untuk SRP yang dikelola UP. Perparkiran, disahkan oleh Gubernur kecuali fasilitas parkir yang menggunakan mesin parkir.

- (2) Karcis parkir untuk satuan ruang parkir yang diselenggarakan oleh badan usaha dikeluarkan penyelenggara bersangkutan.
- (3) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi standar teknis pengamanan yang ditentukan oleh UP. Perparkiran.

Pasal 33

- (1) Karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, memuat data antara lain sebagai berikut:
 - a. nomor seri;
 - b. nama jenis pungutan;
 - c. dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir;
 - d. nomor urut karcis parkir;
 - e. besarnya tarif layanan parkir atau biaya parkir per jam;
 - f. waktu masuk dan keluar kendaraan untuk fasilitas parkir di luar ruang milik jalan;
 - g. nomor kendaraan;
 - h. asuransi untuk satuan ruang parkir di luar ruang milik jalan;
 - i. hari, tanggal, dan bulan; dan
 - j. nomor telepon pengaduan.
- (2) Karcis parkir dilarang memuat data dan/atau informasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna karcis, dan standar teknis pengamanan karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGGUNA JASA PARKIR

Pasal 35

Setiap pengguna jasa parkir mempunyai hak:

- a. mendapatkan satuan ruang parkir;
- b. memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
- c. mendapatkan rasa aman atas pemakaian satuan ruang parkir;
- d. mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar; dan
- e. memperoleh penggantian dari asuransi sesuai dengan klaim yang berlaku dari penggunaan SRP.

Pasal 36

Pengguna jasa parkir mempunyai kewajiban:

- a. membayar atas pemakaian SRP;
- b. menyimpan karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian SRP;
- c. mematuhi rambu parkir, SRP, tanda isyarat parkir, dan ketentuan parkir lain;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam mobil.

Pasal 37

- (1) Setiap pengguna jasa parkir dilarang parkir di luar batas SRP yang ditetapkan oleh penyelenggara parkir.
- (2) Setiap pengguna jasa parkir dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangangi kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk ke tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggu kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna parkir dilarang parkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang parkir dengan rambu dilarang parkir dan/atau marka parkir.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pengguna jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PETUGAS PARKIR

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menyediakan Petugas Parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. juru parkir; dan
 - b. koordinator juru parkir.
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memakai pakaian seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan lainnya.

Pasal 40

- (1) Hak dan kewajiban Petugas Parkir berdasarkan Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis antara penyelenggara parkir dengan Petugas Parkir.

- (2) Hak dan kewajiban Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di ruang milik jalan berdasarkan surat tugas yang dibuat tertulis antara penyelenggara parkir dengan Petugas Parkir.

Pasal 41

Petugas parkir mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang parkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyerahkan karcis parkir; dan
- d. menerima pembayaran penggunaan satuan ruang parkir sesuai ketentuan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

SATUAN RUANG PARKIR DAN SARANA PARKIR

Bagian Kesatu

Satuan Ruang Parkir

Pasal 43

- (1) Setiap fasilitas parkir wajib dibuat SRP.
- (2) SRP di ruang milik jalan dapat dibuat serong atau paralel dengan memperhatikan :
 - a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukkan lahan sekitarnya; dan
 - f. peranan jalan bersangkutan.
- (3) SRP di gedung parkir dan pelataran/taman parkir dapat dibuat serong atau tegak lurus.

Pasal 44

- (1) Pembuatan SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, harus memenuhi standar SRP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar SRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Sarana Parkir

Pasal 45

- (1) Setiap penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan, wajib menyediakan sarana parkir sekurang-kurangnya:
 - a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir;
 - b. pintu masuk dan pintu keluar parkir;
 - c. jalur tunggu;
 - d. rambu yang menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar parkir;
 - e. gardu di pintu masuk dan pintu keluar parkir;
 - f. tanda isyarat yang menerangkan satuan ruang parkir penuh atau tidak penuh;
 - g. peralatan penyedia karcis parkir atau hasil cetakan elektronik;
 - h. tanda masuk dan tanda keluar parkir;
 - i. biaya parkir bagi penyelenggara yang memungut; dan
 - j. sistem keamanan parkir.
- (2) Ukuran dan pemasangan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan UP.Perparkiran.

Pasal 46

- (1) Sarana parkir di ruang milik jalan sekurang-kurangnya:
 - a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir dan/atau dengan rambu tambahan yang menerangkan batasan waktu dan cara parkir;
 - b. rambu yang menerangkan golongan tempat parkir dan tarif layanan parkir; dan
 - c. karcis parkir.
- (2) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh UP.Perparkiran.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
GANTI KERUGIAN

Pasal 48

- (1) Pengguna jasa parkir yang kendaraan hilang atau rusak saat parkir di tempat parkir wajib melaporkan kepada petugas parkir atau penyelenggara parkir.
- (2) Laporan kendaraan hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menunjukkan sekurang-kurangnya:
 - a. karcis parkir atau kartu parkir pada saat kejadian;
 - b. identitas pengguna jasa parkir;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan bermotor; dan
 - d. Bukti bahwa kehilangan atau kerusakan dari kendaraan yang diparkir terjadi pada tempat parkir.

Pasal 49

- (1) Ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak pada saat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, di luar ruang milik jalan menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir melalui asuransi.
- (2) Kendaraan yang sudah diasuransikan oleh pemilik kendaraan, ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak pada saat parkir menjadi tanggung jawab asuransi bersangkutan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
TARIF LAYANAN PARKIR DAN PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu

Tarif Layanan Parkir

Pasal 51

- (1) Tarif layanan parkir ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan :
 - a. kawasan (*zoning*) parkir;
 - b. jenis kendaraan; dan
 - c. jam penggunaan SRP.
- (2) Kawasan (*zoning*) parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a.
- (3) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kendaraan golongan I;

- b. kendaraan golongan II;
- c. sepeda motor; dan
- d. sepeda.

Pasal 52

- (1) Tarif parkir pada fasilitas parkir di ruang milik jalan didasarkan atas kawasan (*zoning*) parkir.
- (2) Perbedaan tarif parkir antar kawasan (*zoning*) parkir dengan bukan kawasan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atas persetujuan DPRD.

Pasal 53

- (1) Tarif parkir pada fasilitas parkir diluar ruang milik jalan dihitung berdasarkan penggunaan SRP dan jam penggunaan SRP.
- (2) Besaran tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau paling lambat 2 (dua) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atas persetujuan DPRD.

Pasal 54

- (1) Gubernur dapat membebaskan sebagian atau seluruhnya pungutan tarif layanan parkir pada :
 - a. rumah ibadah;
 - b. kantor Pemerintah;
 - c. bangunan sosial; dan
 - d. bangunan pendidikan.
- (2) Pembebasan pungutan tarif layanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku jika digunakan untuk kegiatan lain.

Pasal 55

- (1) Dalam kegiatan tertentu, Gubernur dapat menentukan besaran tarif layanan parkir secara khusus.
- (2) Pemanfaatan fasilitas parkir untuk kegiatan lain yang menyebabkan terganggunya pelayanan parkir, penyelenggara kegiatan wajib membayar tarif layanan selama kegiatan berlangsung.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 55, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pajak Parkir

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan (*off street*) merupakan objek pajak parkir sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan penerimaan maka pemungutan pajak parkir wajib dilaksanakan melalui sistem pengawasan dan transaksi secara *on-line*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan *on-line system* Pajak Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan pajak parkir secara *on-line* maupun manual dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak parkir dan tata cara pemungutan pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

BAB X

BIAYA PENITIPAN KENDARAAN

Pasal 59

- (1) Gubernur menetapkan tarif penitipan kendaraan di fasilitas parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan badan usaha.
- (2) Besar tarif penitipan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan lokasi tempat penitipan dan jenis kendaraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penitipan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pembinaan penyelenggaraan parkir, meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - c. bimbingan perencanaan teknis;

- d. sosialisasi perparkiran kepada masyarakat; dan
 - e. pembinaan teknis kepada penyelenggara parkir.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan parkir, meliputi:
- a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan parkir;
 - c. pengawasan penyelenggara parkir dan petugas parkir; dan
 - d. penertiban.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan UP. Perparkiran berdasarkan kegiatan yang disusun dalam program jangka panjang dan menengah perparkiran.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 61

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi UP. Perparkiran dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 62

- (1) Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 63

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 46 ayat (1) dapat diberikan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;

- b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pembatalan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 64

- (1) Kendaraan bermotor yang parkir di tempat yang dinyatakan dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan/atau yang dinyatakan dilarang parkir oleh penyelenggara parkir, dapat dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu pengguna jalan dan/atau pengguna jasa parkir atas prakarsa pengemudi kendaraan itu sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak lain.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 15 (lima belas) menit sejak kendaraan parkir, pengemudi kendaraan tidak memindahkan kendaraannya, pemindahan kendaraan dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang di ruang milik jalan atau petugas parkir di luar ruang milik jalan.
- (3) Kendaraan tidak boleh dipindahkan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum jangka waktu 15 (lima belas) menit pengemudi dan/atau pemilik kendaraan berhasil diketemukan oleh petugas yang berwenang atau petugas parkir.
- (4) Pemindahan kendaraan dilakukan ketempat lain yang tidak mengganggu pengguna jalan dan/atau pengguna jasa parkir lain ke tempat yang ditentukan oleh petugas yang berwenang atau petugas parkir di luar ruang milik jalan.
- (5) Dalam melakukan pemindahan kendaraan, petugas yang berwenang harus :
- a. menggunakan mobil derek;
 - b. bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya;
 - c. membuat berita acara pemindahan kendaraan; dan
 - d. memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor.
- (6) Petugas yang berwenang dan/atau petugas parkir di luar ruang milik jalan wajib mengawasi kendaraan yang parkir tidak diketahui pemiliknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

Pasal 65

- (1) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5), menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.
- (2) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Besar biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Pasal 66

Setiap orang dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan parkir di ruang milik jalan untuk kegiatan tertentu tanpa izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 67

Penyelenggara parkir yang menyediakan fasilitas parkir vallet tidak sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 68

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum atau badan usaha yang menyelenggarakan parkir tidak memiliki izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pemegang izin yang terlambat memperpanjang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dan denda administratif paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak memenuhi ketentuan dalam izin penyelenggaraan parkir, dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menyediakan fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 69

- (1) Setiap penyelenggaraan parkir yang tidak dapat memberikan jaminan keamanan dan kelancaran lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan bermotor ke dan dari lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- (2) Setiap penyelenggara parkir yang tidak menyediakan fasilitas parkir sepeda motor dan sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak memberikan tanda parkir berupa karcis atau sticker langganan atau hasil cetakan komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan yang terbukti tidak mengasuransikan kendaraan yang parkir di SRP yang menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menerapkan standar pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti karcis parkir tidak memenuhi standar teknis pengamanan pada karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan tidak memuat data atau tidak memuat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti membiarkan kendaraan parkir di luar SRP yang ditentukan dan/atau membiarkan kendaraan parkir yang menyebabkan terganggu keluar dan/atau masuk kendaraan ke tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 70

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menyediakan petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- (2) Setiap penyelenggara parkir yang tidak melengkapi petugas parkir dengan pakaian seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dan denda administratif paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 71

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang terbukti melakukan pungutan tarif parkir di tempat ibadah, kantor pemerintah, bangunan sosial, bangunan pendidikan, atau di lokasi tertentu yang ditetapkan bebas biaya layanan parkir oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang terbukti melakukan pemborongan fasilitas parkir di ruang milik jalan tanpa mendapatkan izin dari Gubernur, dapat dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 72

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang tidak menyediakan sarana parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap penyelenggara parkir yang menyediakan sarana parkir di ruang milik jalan yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan denda administratif paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 73

Setiap pengguna parkir yang tidak dapat menunjukkan tanda parkir pada saat keluar tempat parkir, selain dikenakan kewajiban membayar tarif layanan parkir juga dikenakan sanksi administrasi denda 10 (sepuluh) kali dari tarif dasar parkir atau biaya dasar parkir setelah menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan yang sah.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan pelanggaran;
 - e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
 - h. pejabat penyidik pegawai negeri sipil, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - i. pejabat penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya pada fungsi rambu parkir, alat pemberi isyarat parkir, sehingga tidak berfungsi, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dengan sengaja melakukan parkir di tempat yang dinyatakan dilarang parkir dengan rambu dilarang parkir dan/atau marka parkir, dapat dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan bermotor dan/atau pengguna jasa parkir melakukan kegiatan bongkar dan muat di area parkir yang menyebabkan terganggu pengguna jasa parkir lainnya, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Selain pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 75, dapat dijatuhi pidana tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Setiap penyedia fasilitas tempat parkir berupa gedung parkir murni dan gedung parkir pendukung yang tidak sesuai dengan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Setiap penyedia fasilitas tempat parkir berupa gedung parkir murni dan gedung parkir pendukung yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan pengguna parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang dan/atau badan usaha dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagai berikut:

- a. bangunan umum dan/atau yang diperuntukan untuk kegiatan dan/atau usaha tidak dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- b. menggunakan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir di luar jalan kolektor dan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- c. menggunakan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir pada rambu larangan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); dan
- d. memidahtanggankan izin penyelenggara parkir kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Izin penyelenggaraan parkir yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa izin penyelenggaraan parkir tersebut.

- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini pada saat perpanjangan.

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang terkait secara langsung dengan penyelenggaraan perparkiran wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2012

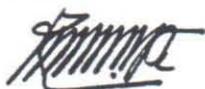
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP. 195508261978011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERPARKIRAN

I. UMUM

Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi daya tarik bagi sebagian warga negara baik dalam negeri (luar daerah) maupun luar negeri, sehingga memberikan kontribusi peningkatan jumlah penduduk kota Jakarta disertai peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, serta peningkatan kegiatan usaha, pusat perbelanjaan, perkantoran, perdagangan, dan jasa lainnya. Peningkatan tersebut menimbulkan masalah bagi kota Jakarta diantaranya, terjadi bangkitan parkir baik di ruang milik jalan (*on street parking*) maupun di luar ruang milik jalan (*off street parking*).

Pemanfaatan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan merubah fungsi jalan dan termasuk pelanggaran. Oleh sebab itu, pemanfaatan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir menurut Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya diperbolehkan di jalan kolektor dan jalan lokal. Akibat tidak memadai fasilitas parkir di luar ruang milik jalan menyebabkan masyarakat menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir. Tugas Pemerintah Daerah mengendalikan pemanfaatan ruang milik jalan yang digunakan oleh masyarakat atau pengguna jalan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan menempatkan Petugas Parkir di ruas jalan tersebut. Meskipun demikian, pemanfaatan dan penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir secara bertahap dan sistematis ditiadakan dengan memperhatikan ketersediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.

Perparkiran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, termasuk urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dan merupakan salah satu urusan wajib, yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan di bidang transportasi. Atas dasar itu, perparkiran harus diselenggarakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan mengedepankan peran serta masyarakat dan/atau badan usaha dalam penyelenggaraan perparkiran.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran, diantaranya mengendalikan penggunaan

ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir, mendorong pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan baik sebagai usaha khusus maupun penunjang usaha pokok. Namun upaya tersebut belum optimal, antara lain disebabkan lahan terbatas, sehingga fasilitas parkir yang tersedia tidak memadai. Di lain pihak muncul masalah baru, seperti jaminan keamanan, kemacetan lalu lintas akibat penggunaan ruang milik jalan sebagai tempat parkir, dan sebagainya. Sehubungan itu, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan perparkiran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak mampu mengatasi masalah perparkiran yang terjadi saat ini. Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah tersebut sudah banyak diganti. Oleh sebab itu, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 perlu diganti atau disempurnakan.

Sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Penyelenggaraan fasilitas tersebut diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha berupa usaha khusus perparkiran atau penunjang usaha pokok.

Pemanfaatan dan penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir dikelola oleh UP.Perparkiran dan dilaksanakan oleh pihak ketiga. Dengan demikian, peran dan fungsi UP.Perparkiran membina dan mengawasi penyelenggaraan perparkiran.

Penggunaan "tarif parkir" dikarenakan terbatas jumlah aparat Pemerintah Daerah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memungut Retribusi Parkir yang selama ini dipungut oleh Petugas Parkir dengan status Pekerja Harian Lepas (PHL). Hal tersebut tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah melainkan juga menimbulkan masalah kepada pengguna jasa parkir dan Pemerintah Daerah. Disamping saat ini UP. Perparkiran menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), sehingga tidak diperkenankan lagi menggunakan istilah retribusi dalam pungutan parkir kepada masyarakat.

Perubahan penyelenggaraan perparkiran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan lebih efisien dan efektif sehingga dapat mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kapastian hukum adalah penyelenggara perparkiran, pengelola perparkiran, dan pengguna jasa parkir mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip transparan adalah keterbukaan

kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabel adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip seimbang adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara perparkiran

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip keamanan dan keselamatan adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jalan dan pengguna parkir di area perparkiran.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan gedung parkir murni adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan gedung parkir pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan untuk fasilitas parkir yang bersifat penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelataran/taman parkir murni adalah suatu areal tanah tertentu di luar badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.

Huruf d

Yang dimaksud pelataran / taman parkir pendukung gedung suatu areal tanah yang terletak di luar ruang milik jalan yang digunakan untuk fasilitas parkir sebagai kelengkapan

bangunan gedung dan/atau bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.

Ayat (2)

Analisis dampak lalu lintas sekurang-kurangnya memuat :

- a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
- e. rencana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud terintegrasi dengan moda angkutan adalah angkutan massal, seperti di stasiun, terminal dalam kota, dan terminal luar kota, antara lain di Terminal Lebak Bulus, Terminal Pasar Minggu, Terminal Blok M, Stasiun Dukuh Atas, stasiun Manggarai, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulo Gebang, dan pusat kegiatan lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kerja sama adalah sewa, pemanfaatan kerja sama (PKS), bangun guna serah (BGS) atau bangun serah guna (BSG).

Yang dimaksud kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain adalah Pemerintah Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota/KabupatenTangerang, dan Kota/Kabupaten Bekasi. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan dan/atau usaha adalah pusat perdagangan, perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, perdagangan eceran, pasar swalayan, mini market, pasar, sekolah, perguruan tinggi, tempat rekreasi, hotel, tempat penginapan (apartemen), rumah sakit, bioskop, gedung pertemuan, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan sesuai dengan kebutuhan SRP dalam ayat ini adalah perhitungan kebutuhan satuan ruang parkir dengan luas area yang diperuntukan untuk parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan SRP minimal adalah satuan ruang parkir berdasarkan kepemilikan kendaraan, luas lantai bangunan atau jumlah kendaraan yang parkir.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Yang dimaksud dengan jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati ruas jalan dalam satuan waktu tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan karakteristik kecepatan adalah kecepatan kendaraan bila tidak ada fasilitas parkir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan dimensi kendaraan adalah jenis kendaraan yang melalui ruas jalan tersebut dalam waktu tertentu

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan peranan jalan bersangkutan adalah sebagai jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui penyediaan fasilitas parkir di ruang milik jalan bersangkutan mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.

Yang dimaksud dengan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

Yang dimaksud dengan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

Yang dimaksud dengan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Yang dimaksud dengan media adalah media cetak, media elektronik.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan tertentu adalah kegiatan yang bersifat insidental seperti: pekan olahraga, pekan raya, pertunjukan hiburan, pameran, dan lainnya yang sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud penyandang disabilitas atau nama lain adalah orang yang mempunyai kelainan fisik yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara selengkapnyanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan orang lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan parkir vallet atau parkir yang memberikan pelayanan yang sejenis adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan pelaksanaan parkir dilakukan oleh petugas parkir, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Persyaratan administrasi dimaksud sekurang-kurangnya:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab usaha;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. fotokopi Izin Mendiri Bangunan (IMB);
- d. Surat Izin Usaha;
- e. fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- f. fotokopi surat kepemilikan/penguasaan gedung atau tanah; dan
- g. peta lokasi fasilitas parkir.

Persyaratan teknis dimaksud sekurang-kurangnya memiliki gedung atau menguasai areal tanah berdasarkan satuan ruang parkir yang disediakan.

Ayat (2)

Yang dimaksud penyelenggaraan usaha parkir murni adalah penyelenggara parkir menyediakan fasilitas parkir berupa gedung parkir murni dan/atau pelataran/taman parkir murni.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Instansi terkait adalah Kepolisian dan/atau Satpol PP.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Fasilitas parkir di ruang milik jalan tidak dapat diasuransikan karena bersifat sementara selama di ruas jalan tersebut belum tersedia fasilitas parkir permanen berupa gedung parkir dan/atau pelayaran/taman parkir. Mengasuransikan fasilitas parkir di ruang milik jalan berarti melegalkan pemanfaatan ruang milik jalan untuk fungsi lain. Hal tersebut termasuk pelanggaran pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Ayat (2)

Untuk keperluan klaim asuransi, penyelenggara parkir diharuskan menyediakan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan perjanjian antara penyelenggara parkir dan pihak asuransi. Dalam memberikan kepastian hukum dan kemudahan klaim bagi pengguna jasa parkir, perihal yang dijamin oleh asuransi beserta prasyarat untuk mengajukan klaim disebutkan dalam karcis atau sticker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran SRP.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) adalah tolok ukur minimal yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan parkir dan acuan penilaian kualitas pelayanan parkir sebagai kewajiban dan janji penyelenggara parkir kepada pengguna jasa parkir dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Standar Pelayanan Minimum (SPM) parkir dilaksanakan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, berupa pelayanan parkir biasa dan pelayanan parkir khusus, seperti parkir vallet yaitu salah satu bentuk pelayanan jasa parkir dilakukan penyelenggara parkir dalam memberikan kemudahan kepada pengguna jasa parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Akses bangunan gedung yang dimaksud ialah akses masuk dan keluar gedung termasuk jalur jalan yang dilalui oleh akses tersebut.

Huruf g

Hidran pemadam kebakaran dimaksud ialah hidran atau sumber air sejenis yang ada pada pelataran/taman parkir murni atau pelataran/taman parkir pendukung. Sedangkan untuk hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis yang berada pada gedung parkir murni atau gedung parkir pendukung, persyaratan jarak larangan penyediaan fasilitas parkir mengikuti ketentuan teknis bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian satuan ruang parkir kepada setiap kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir.

Yang dimaksud dengan mesin parkir adalah alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung penggunaan satuan ruang parkir secara otomatis atau berbasis teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data dan/atau informasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain data dan/atau informasi yang merugikan pengguna jasa parkir sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Apabila satuan ruang parkir penuh penyelenggara parkir memberikan informasi pada pintu masuk.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan rasa aman adalah ada jaminan dari penyelenggara parkir atas kendaraan yang parkir di satuan ruang parkir dari kerusakan, kehilangan, dan pencurian, selama kendaraan parkir di satuan ruang parkir.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Petugas Parkir adalah seseorang yang "dipekerjakan" atau ditugaskan oleh penyelenggara parkir untuk memberikan pelayanan parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja dimaksud dilakukan pada fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh Badan usaha. Perjanjian kerja tersebut sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama dan alamat penyelenggara parkir;
- b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Petugas Parkir;
- c. jenis pekerjaan;
- d. tempat pekerjaan;
- e. besarnya upah atau penghasilan dan cara pembayarannya;
- f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban penyelenggara parkir dan petugas parkir;
- g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Hak dan kewajiban petugas parkir yang diselenggarakan atau badan usaha berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis antara Pimpinan Penyelenggara parkir dengan Petugas Parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan peranan jalan yang bersangkutan adalah mengenai status jalan yang bersangkutan. Apabila jalan kabupaten/kota tersebut mempunyai peranan penting terhadap provinsi, bupati/walikota dapat mengusulkan jalan kabupaten/kota tersebut menjadi jalan provinsi kepada Gubernur.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan identitas pengguna jasa parkir adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Kendaraan golongan I meliputi sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya

Huruf b

Kendaraan golongan II meliputi bus, truck dan sejenisnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan zoning adalah suatu Kawasan yang kondisi kepadatan lalu lintas sudah mencapai titik ambang jenuh dan di Kawasan tersebut diberlakukan pembatasan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir berdasarkan waktu dan/atau hari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Tarif parkir di luar ruang milik jalan dapat dilaksanakan secara progresif dengan menggunakan sistem komputerisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pajak parkir online adalah pelaksanaan pemungutan biaya parkir pada penyelenggaraan fasilitas parkir diluar

ruang milik jalan dapat diakses secara langsung oleh Dinas Pelayanan Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Yang dimaksud dengan bukti kepemilikan kendaraan yang sah berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Izi Mengemudi (SIM), untuk kemudian dicocokkan dan difotokopi seluruhnya untuk mengantisipasi adanya pengaduan kehilangan kendaraan bermotor dari pihak lain.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sesuai peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 287 ayat (1) dan/atau ayat (2) dan/atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sesuai peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 305 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Pasal 76

Yang dimaksud dengan pidana tambahan dalam ayat ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Pasal 77

Yang dimaksud dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pidana sesuai peraturan perundang undangan dalam ayat ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 32

DAFTAR PERUSAHAAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

JAKARTA SELATAN

| NO | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT LOKASI | NOMOR DAN TANGGAL SURAT | | |
|----|------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | TEGURAN I | TEGURAN II | TEGURAN III |
| 1 | RS. Mayapada | Jl. Lebak Bulus I Kapling 29. Jak-Sel | 1317/1.811.4 7 Agustus 2014 | 1446/1.881.4 22 Agustus 2014 | 1544/1.811.4 3 September 2014 |
| 2 | Kantor Pos Tebet | Jakarta Selatan | 1166/1.811.4 7 Juli 2014 | 1231/1.811.4 15 Juli 2014 | 1324/1.811.4 7 Agustus 2014 |
| 3 | PT. Aneka Buana | Jl. Pinang Raya Pondok Labu, Jakarta Selatan | 2323/1.811.4 6 November 2014 | 2362/1.811.4 17 November 2014 | 2416/1.811.4 25 November 2014 |

JAKARTA TIMUR

| NO | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT LOKASI | NOMOR DAN TANGGAL SURAT | | |
|----|--|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | TEGURAN I | TEGURAN II | TEGURAN III |
| 1 | Kantor Pos Pondok Bambu | Jakarta Timur | 1164/1.811.4 7 Juli 2014 | 1236/1.811.4 15 Juli 2014 | 1323/1.811.4 7 Agust 2014 |
| 2 | Kantor Pos Jatinegara | Jakarta Timur | 1169/1.811.4 7 Juli 2014 | 1233/1.811.4 15 Juli 2014 | 13326/1.811.4 7 Agust 2014 |
| 3 | Kalbis Institut Rawasari | Jakarta Timur | 1319/1.811.4 7 Agust 2014 | 1447/1.811.4 22 Agust 2014 | 1542/1.811.4 3 Sept 2014 |
| 4 | BSI Pemuda | Jakarta timur | 1165/1.811.4 7 Juli 2014 | 1235/1.811.4 15 Juli 2014 | 1325/1.811.4 7 Agust 2014 |
| 5 | Kantor Pos Rawamangun | Jl.Pemuda Raya Jak-Tim | 1089/1.811.4 18 Juni 2014 | 1131/1.811.4 30 Juni 2014 | 1211/1.811.4 8 Juli 2014 |
| 6 | Taman Sari Hive | Jl.Di Panjaitan Kapling 3-4 Jak-Tim | 1213/1.811.4 8 Juli 2014 | 1237/1.811.4 15 Juli 2014 | 1321/1.811.4 7 Agust 2014 |
| 7 | Otorita Universitas Kristen Indonesia | Jl.Mayjend Sutoyo No.62 Jak-Tim | 1214/1.811.4 8 Juli 2014 | 1238/1.811.4 15 Juli 2014 | 1320/1.811.4 7 Agust 2014 |
| 8 | KFC Ciracas | Jl. Raya Bogor Jak-Tim | 1820/1.811.4 3 Sept 2014 | 1996/1.811.4 3 Okt 2014 | 2324/1.811.4 6 Nov 2014 |
| 9 | KFC Jatinegara | Jl. Jatinegara Timur Jak- Tim | 1821/1.811.4 3 Sept 2014 | 1997/1.811.4 3 Okt 2014 | 2321/1.811.4 6 Nov 2014 |
| 10 | KFC Kalimalang | Jl. Kalimalang Jak-Tim | 1819/1.811.4 3 Sept 2014 | 1995/1.811.4 3 Okt 2014 | 2325/1.811.4 6 Nov 2014 |
| 11 | Ruko Cibubur II | Jl. Lapangan Tembak Cibubur Jak-Tim | 2361/1.811.4 17 Nov 2014 | 2415/1.811.4 25 Nov 2014 | 2488/1.811.4 4 Des 2014 |

DATA PENYELENGGARA PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

| NO. URUT | PERUSAHAAN | NAMA GEDUNG (LOKASI) | ALAMAT LOKASI PARKIR | KELURAHAN | KECAMATAN | SRP | | TARIP BIAYA PARKIR | | | |
|----------|--------------------------------------|---|---|------------------|------------------|-------|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | MOBIL | MOTOR | TARIP DASAR (Rp.) | TAMBAHAN (Rp.) | TARIP DASAR (Rp.) | TAMBAHAN (Rp.) |
| 1 | Anugerah Bina Karya, PT | ITC Fatmawati/PT. Duta Perifiri Tbk | Jl. RS. Fatmawati No. 39 | CIPETE | CIPETE | 1100 | 1050 | 2000 /jam l | 2000 /jam l | 2000 /jam l | 500 /jam |
| 2 | Anugerah Bina Karya PT | Grand ITC Permata Hijau | Jl. Arteri Permata Hijau | PERMATA HIJAU | PERMATA HIJAU | 1500 | 950 | 2000 /jam l | 2000 /jam l | 2000 /jam l | 500 /jam |
| 3 | Alfa Retailindo PT Tbk | Alfa Retailindo Ciledug | Jl. Ciledug Raya No. 37 Cipulir | CIPULIR | KEBAYORAN LAMA | 20 | 50 | TIDAK MEMUNGUT | TIDAK MEMUNGUT | TIDAK MEMUNGUT | 500 /jam |
| 4 | Securindo Packatama Indonesia, PT | Pert. Plaza Cipulir | Jl. Ciledug Raya No. 18 | CIPULIR | KEBAYORAN LAMA | 81 | 290 | 2000 /jam l | 2000 /jam l | 2000 /jam l | 500 /jam |
| 5 | Carrefour Indonesia, PT | Carrefour Lebak Bulus | Jl. Lebak Bulus No. 8 | PONDOK PINANG | KEBAYORAN LAMA | 658 | 850 | TIDAK MEMUNGUT | TIDAK MEMUNGUT | TIDAK MEMUNGUT | 500 /jam |
| 6 | Carrefour Indonesia, PT | Carrefour MT Haryono | Jl. MT. Haryono | CIKOKO | CIKOKO | 430 | 460 | TIDAK MEMUNGUT | TIDAK MEMUNGUT | TIDAK MEMUNGUT | 500 /jam |
| 7 | Dinamika Mitra Pratama PT | Grand Kemang Hotel | Jl. Kemang Raya 2 H | BANGKA | MAMPANG PRAPATAN | 200 | 100 | 2000 /JAM | 2000 /JAM | 2000 /JAM | 500 /JAM |
| 8 | Grahakarya Investama, PT | Millenia dan Bukit Ponsel | Jl. Jend. Sudirman | SENAYAN | KEBAYORAN BARU | 90 | 2000 /2jam l | 2000 /2jam l | 2000 /jam berikutnya | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam |
| 9 | Grahakarya Investama, PT | Semanggi Expo/KTS Lot 7 SCBD | Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 | SENAYAN | KEBAYORAN BARU | 180 | 1100 | 2000 /2 jam l | 2000 /jam berikutnya | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam |
| 10 | GSIM Gunung Sewu Inti Management, PT | Gedung Plaza Mebel | Jl. RS. Fatmawati Kav. 5 | GANDARIA SELATAN | CILANDAK SELATAN | 70 | 25 | 2000 /jam l | 2000 /jam berikutnya | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam |
| 11 | GSIM Gunung Sewu Inti Management, PT | Graha Daya Vania | Jl. Bantio II No. 56 A | KRAMAT PELA | KEBAYORAN BARU | 178 | 80 | 2000 /jam l | 2000 /jam berikutnya | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam |
| 12 | Karya Parkir Semesta, PT | Plaza Adorama | Jl. Kemang Raya No. 17 | BANGKA | MAMPANG PRAPATAN | 50 | 30 | 1000 /jam l | 1000 /jam berikutnya | 1000 /jam berikutnya | 500 sekali parkir |
| 13 | Mekar Prana Indah PT | Komplek Bidakara | Jl. Jend. Gatot Subroto No. 71-73 | MENTENG DALAM | TEBET | 900 | 300 | 3000 /jam l | 3000 /jam berikutnya | 3000 /jam berikutnya | 500 /jam |
| 14 | Melawai Hotel & Tourist PT | Hotel Melawai | Jl. Melawai Raya No. 17-20 | MELAWAI | KEBAYORAN BARU | 25 | 6000 | TIDAK MEMUNGUT | TIDAK MEMUNGUT | TIDAK MEMUNGUT | 500 /jam |
| 15 | Metro Supermarket Realty Tbk. | Gedung Melawai Plaza | Jl. Melawai Raya No. 166 Kebayoran Baru | MELAWAI | KEBAYORAN BARU | 82 | 40 | 2000 /jam l | 2000 /jam berikutnya | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam |
| 16 | Pasaraya Tosersajaya, PT | Pasaraya Manggarai | Jl. Sulfian Agung No. 1 | PSR MANGGIS | SETIA BUDI | 350 | 125 | 2000 /jam l | 2000 /jam berikutnya | 2000 /jam berikutnya | 500 sekali parkir |
| 17 | Pakuwon Sentosa Anggraeni PT | Blok M Plaza | Jl. Bulungan No. 76 Keb. Baru | KRAMAT PELA | KEBAYORAN BARU | 446 | 850 | 2000 /jam l | 2000 /jam berikutnya | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam |
| 18 | Pasaraya Tosersajaya, PT | Pasaraya Blok M | Jl. Iskandarsyah II No. 2 | MELAWAI | KEBAYORAN BARU | 1400 | 200 | 2000 /jam l | 2000 /jam berikutnya | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam |
| 19 | Securindo Packatama Indonesia, PT | Hotel Four Season dth Hotel Regent | Jl. HR. Rasuna Said | SETIA BUDI | SETIA BUDI | 457 | 300 | 2000 /jam l | 2000 /jam berikutnya | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam |
| 20 | Perorangan | Pert. Panglima Polim | Jl. Panglima Polim Raya | PULO | KEBAYORAN BARU | 40 | 10 | 2000 /jam l | 1000 /jam berikutnya | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam |
| 21 | Securindo Packatama Indonesia, PT | Mai Pondok Indah/PT. Metropolitan Kencana | Jl. Metro Pondok Indah Blok III B | PONDOK PINANG | KEBAYORAN LAMA | 1760 | 1500 | 2000 /jam l | 2000 /jam berikutnya | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam |
| 22 | Securindo Packatama Indonesia, PT | Hotel Karika Chandray/PT. Karika Chandra | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18-20 | KARET SEMANGGI | SETIA BUDI | 624 | 150 | 2000 /jam l | 2000 /jam berikutnya | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam |
| | | | | Sub Tolei | Sub Tolei | 10671 | 8480 | | | | |

| NO. URUT | PERUSAHAAN | NAMA GEDUNG (LOKASI) | ALAMAT LOKASI PARKIR | KELURAHAN | KECAMATAN | SRP | | TARIP BIAYA PARKIR | | | |
|----------|-----------------------------------|---|---|-------------------|----------------|-------|-------|--------------------|----------------------|-------------------|-------|
| | | | | | | MOBIL | MOTOR | TARIP DASAR (Rp.) | MOBIL | | MOTOR |
| | | | | | | | | | TAMBAHAN (Rp.) | TAMBAHAN (Rp.) | |
| 23 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Cilandak Town Square PT, Graha Megastore Raya | Jl. TB. Simatupang Kav. 17 | CILANDAK TENGAH | CILANDAK | 1273 | 300 | 2000 /jam | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 24 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Hero Casel Subroto PT, Hero Supermarket Tbk | Jl. Jend. Gatot Subroto 177 A Kav. 64 | MENTENG DALAM | TEBET | 297 | 350 | 3000 /jam | 2000 /jam berikutnya | 1000 /jam | |
| 25 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Hero Bintaro PT, Hero Supermarket Tbk | Jl. RC Veteran | BINTARO | PESANGGRAHAN | 42 | 42 | 3000 /jam | 2000 /jam berikutnya | 1000 /jam | |
| 26 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Plaza Pondok Indah I | Jl. Metro Duta Niaga Blok B. V | PONDOK PINANG | KEBAYORAN LAMA | 260 | 150 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 27 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Plaza Pondok Indah III | Jl. TB. Simatupang | RAWA BARAT | KEBAYORAN BARU | 178 | 30 | 3000 /jam | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 28 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Hotel Crowne Plaza | Jl. Galot Subroto Kav. 2-3 | KARET SEMANGGI | SETIA BUDI | 10 | 50 | 3000 /jam | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 29 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Gedung Tebet Indraya | Jl. Lejend MT Haryono No. 09 | TEBET PAYA | TEBET | 150 | 70 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 30 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Electronic city | Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 | SENYAYAN | KEBAYORAN BARU | 150 | 75 | 2000 /jam | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 31 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Plaza Asia | Jl. Jend Sudirman Kav. 59 No 77 | SENYAYAN | KEBAYORAN BARU | 400 | 200 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 32 | Securindo Packatama Indonesia. PT | The Ritz Carlton Hotel | Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav E1.1 | KUNINGAN TIMUR | SETIA BUDI | 750 | 250 | 2000 /jam | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 33 | Securindo Packatama Indonesia. PT | The Plaza Semanggi | Jl. Jend Sudirman Kav 50 | KARET SEMANGGI | SETIA BUDI | 1300 | 850 | 2000 /jam | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 34 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Mal Pasar Vestifal | Jl. HR. Rasuna Said Kav C 22 | KARET KUNINGAN | SETIA BUDI | 441 | 200 | 3000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 35 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Gedung Sentra Pancoran | Jl. MT Haryono Kav 1 | TEBET BARAT | TEBET | 70 | 110 | 2000 /jam | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 36 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Mal Pondok Indah II | Jl. Metro Pondok Indah Kav TA | PONDOK PINANG | KEBAYORAN LAMA | 1900 | 1500 | 2000 /jam | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 37 | Surya Utama Nusaparka. PT | The Park Lane | Jl. Casablanca Kav. 18 | MENTENG ATAS | TEBET | 112 | 76 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 38 | ISS. Parking Management. PT | iTC Kuningan | Jl. Prof. Dr. Satrio Setiabudi | KARET KUNINGAN | SETIA BUDI | 1000 | 650 | 2000 /jam | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 39 | Surya Utama Nusa Parka PT | Mall Ambasadador | Jl Prof Dr Satrio | KARET KUNINGAN | SETIA BUDI | 800 | 300 | 2000 /jam | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 40 | Surya Utama Nusa Parka PT | Hotel Harris Tebet | Jl Dr Saharjo No 191 | MANGGARAI SELATAN | TEBET | 75 | 80 | 2000 /jam | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 41 | TCP Intermusa. PT | Hotel Gran Melia | Jl. HR. Rasuna Said Kav. X - O | KUNINGAN TIMUR | SETIA BUDI | 840 | 250 | 3000 /jam | 3000 /jam berikutnya | 1000 /jam | |
| 42 | Tribandhawa Binasarana. PT | Kailibata Mall | Jl. Raya Kalibata | RAWA JATI | PANCORAN | 296 | 1000 | 2000 /jam | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 43 | Vira Petra Pratama PT | Plaza Bintaro Saloe | Jl Bintaro Utama I No 1 | BINTARO | PESANGGRAHAN | 53 | 50 | 1000 SEKALI PARKIR | 1500 /jam berikutnya | 500 sekali parkir | |
| 44 | Adiwira Sempurna. PT | Gedung Parkir Basement Tantu BEJ Lot 3-5 | Jl. Jend. Sudirman No. 33-35 Cempaka Putih 2, Jakarta 10430 | SENYAYAN | KEBAYORAN BARU | 1500 | | 2000 /jam | 2000 /jam berikutnya | | |
| 45 | Adiwira Sempurna. PT | Gedung Auto Mall | Jl. Jend. Sudirman | SENYAYAN | KEBAYORAN BARU | 232 | | 2000 /jam | 2000 /jam berikutnya | | |
| 46 | Anakida Indah. PT | Gedung Anakida | Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 27 | TEBET BARAT | TEBET | 40 | 20 | 2000 sekali parkir | 500 sekali parkir | | |
| 47 | Anugerah Bina Karya. PT | Graha Excelcomindo | Jl. Mega Kuningan Lot E4-7 No. 1 Kawasan Mega Kuningan | SETIA BUDI | SETIA BUDI | 275 | 150 | 2000 | TIDAK MEMUNGUT | | |
| | | | | | Sub Total | 12689 | 6753 | | | | |

| NO. URUT | PERUSAHAAN | NAMA GEDUNG (LOKASI) | ALAMAT LOKASI PARKIR | KELURAHAN | KECAMATAN | SRP | | TARIP BIAYA PARKIR | | | TAMBAHAN (Rp.) |
|----------|--|---------------------------------------|---|------------------------|------------------|-------|-------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | MOBIL | MOTOR | MOBIL | | MOTOR | |
| | | | | | | | | TARIP DASAR (Rp.) | TAMBAHAN (Rp.) | | |
| 48 | Anugerah Bina Karya. PT | Taman A 9 | Jl. Mega Kuningan lot 8,9 /A9 | KUNINGAN TIMUR | SETIA BUDI | 92 | 100 | 1500 /jam I | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 49 | Pemhimpunan Penghuni Menara Kadin Ind. PT. ISS. Parking Management | Menara Kadin Indonesia Gedung Verbura | Jl. HR. Rasuna Said Blok 5 Kav. 2-3 | KUNINGAN TIMUR | SETIA BUDI | 524 | 385 | 2000 /jam I | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 50 | Asri Kencana Gemilang. PT | Gedung BIP | Jl. RA. Kartini No. 26 Cilandak Kav. 23 | CILANDAK BARAT | CILANDAK | 250 | 140 | 1000 /jam I | 1000 /jam berikutnya | | |
| 51 | Aston Infir Makmur. PT | Gedung Ariobimo Sentral | Jl. Jend. Gatot Subrolo Kav. 5 Blok X-2 | KUNINGAN TIMUR | SETIA BUDI | 281 | 250 | 3000 /jam I | 3000 /jam berikutnya | 1000 /jam | |
| 52 | Autopark Indonesia. PT | Menara Sudirman | Jl. Jend. Sudirman Kav. 5 Blok X-2 Kav. 60 | SENAYAN | SETIA BUDI | 375 | 400 | 4000 /jam I | 4000 /jam berikutnya | 1500 /jam | |
| 53 | Basmar Abadi. PT | Gd. Plaza Basmar | Jl. Sultan Iskandar muda No.7 | KEBAYORAN LAMA SELATAN | KEBAYORAN BARU | 320 | 100 | 1000 /2 jam I | 500 /jam berikutnya | 500 /sekal parkir | |
| 54 | Bina Mulia Manunggal. PT | Gedung Bina Mulia | Jl. Mampang Prapatan Raya 106 | DUREN TIGA | PANCORAN | 60 | 25 | 2000 /sekal parkir | TIDAK MEMUNGUT | Gratis | |
| 55 | Bunagraha Ardhaprima. PT | Gedung Artha Graha | Jl. HR. Rasuna Said Kav. 10-11 | KUNINGAN TIMUR | SETIA BUDI | 150 | | 1000 /jam I | 500 /jam berikutnya | | |
| 56 | Budi Delta Swakarya | Gedung Wisma Budi | Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 | SENAYAN | KEBAYORAN BARU | 400 | | 2000 /jam I | 1500 /jam berikutnya | | |
| 57 | Bumi Mulia Perkasa Development. PT | Atrium Mulia | Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-6 | KARET KUNINGAN | SETIA BUDI | 76 | | 2000 /jam I | 1500 /jam berikutnya | | |
| 58 | Blue Bird PT | Gedung Blue Bird Group | Jl. HR. Rasuna Said Kav. B 10-11 | SETIA BUDI | Truk/Bus | 281 | 150 | 3000 /jam I | 3000 /jam berikutnya | 1500 /jam | |
| 59 | Chase Plaza. PT | Chase Plaza | Jl. Mampang Prapatan Raya No 60 | TEGAL PARANG | MAMPANG | 323 | 40 | 2000 /jam I | TIDAK MEMUNGUT | | |
| 60 | Chilalex Peri. PT | Menara Bank Danamon | Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 | KARET | SETIA BUDI | 400 | 150 | 1500 /jam I | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 61 | Cipta Pratama Jaya. PT | Sirkuit Red Line Gokart Pondok Indah | Jl. Prof. Dr. Saibto No. 111 Blok 1000 | KUNINGAN TIMUR | SETIA BUDI | 450 | 150 | 3000 /jam I | 3000 /jam berikutnya | 1000 /jam | |
| 62 | Daya Sakti Perdana. PT | Wisma Argo Manunggal | Jl. Metro Pondok Indah III BB Kav. 22 | PONDOK PINANG | KEBAYORAN LAMA | 44 | 10 | 1500 /jam I | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 63 | Dharma Inland. PT | Gedung Graha Pratama | Jl. MT. Haryono Kav. 15 | KARET SEMANGGI | SETIA BUDI | 197 | 400 | 2000 /jam I | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 64 | Dongbang Development. PT | Wisma Korindo | Jl. MT. Haryono Kav. 62 | TEBET | TEBET BARAT | 301 | 50 | 1500 /jam I | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 65 | Duta Parahyangan Lestari. PT | Gd. Menara City Bank | Jl. Metro Pondok Indah Kav. II BA | PANCORAN | PANCORAN | 300 | 250 | 3000 /jam I | 2000 /jam berikutnya | 1000 /jam | |
| 66 | Elhusa Kawasan Komersial | Elhusa Kawasan Komersial PT | Jl. TB Simatupang Kav. 18 RI 02000 Cilandak | PONDOK PINANG | KEBAYORAN LAMA | 123 | | 2000 /jam I | 1500 /jam berikutnya | | |
| 67 | Gedung BankExim. PT | Plaza Mandiri | Jl. Jend. Gatot Subrolo Kav. 36-38 | CILANDAK TIMUR | PASAR MINGGU | 230 | 200 | 2000 /jam I | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 68 | Gema Gedung Anugerah. PT | Gedung Granadi | Jl. Raya Pasar Minggu 17 A | SENAYAN | SENAYAN | 800 | 500 | 1500 /jam I | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 69 | Graha Dana Abadi. PT | GRHA Citra Caraka | Jl. HR. Rasuna Said Blok X - 1 Kav. 8 - 9 | PANCORAN | PANCORAN | 80 | 120 | 2000 /jam I | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 70 | Securindo Packatama Indonesia PT | Gedung Plaza Great River | Jl. Jend. Gatot Subrolo Kav. 52 | KUNINGAN BARAT | MAMPANG PRAPATAN | 385 | 403 | 2000 /jam I | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 71 | | | Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2/1 | KUNINGAN TIMUR | SETIA BUDI | 315 | 450 | 2000 /jam I | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 72 | | | | | Sub Total | 7045 | 4403 | | | | |

| NO. URUT | PERUSAHAAN | NAMA GEDUNG (LOKASI) | ALAMAT LOKASI PARKIR | KELURAHAN | KECAMATAN | SRP | | TARIP BIAYA PARKIR | | | | |
|----------|--|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------|-------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|------|
| | | | | | | MOBIL | MOTOR | MOBIL | | MOTOR | | |
| | | | | | | | | TARIP DASAR (Rp.) | TAMBAHAN (Rp.) | TARIP DASAR (Rp.) | TAMBAHAN (Rp.) | |
| 74 | GSM PT. Graha Sarana Inti | Gedung Plaza Bapindo | Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55 | SEHAYAN | KEBAYORAN BARU | 1000 | 850 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam | |
| 75 | Dinamika Mitra Pratama. PT | Gedung Wisma Mampang | Jl. Mampang Prapatan Raya No. 1 | MAMPANG PRAPATAN | MAMPANG PRAPATAN | 154 | 150 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam | |
| 76 | Hasta Kreasi Mandiri | Simpuk Galery | Jl. Teuku Nyak Arief No. 10 Jl Arteri | GROGOL SELATAN | KEBAYORAN LAMA | 82 | 100 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam | |
| 77 | Inter Bumi Nugraha. PT | Plaza Sentral | Jl. Jend. Sudirman No. 47 | KARET SEMANGGI | SETIA BUDI | 433 | 304 | 4000 /jam | 3000 /jam berikutnya | 1000 /jam | 1000 /jam | |
| 78 | Inti Fauzi Corpora. PT | Graha Inti Fauzi | Jl. Buncit Raya No. 22 | PEJATEN | PASAR MINGGU | 150 | 80 | 3000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 1000 /jam | 1000 /jam | |
| 79 | Jakarta Land. PT | Komplek Metropolitan | Jl. Buncit Raya Kav. 29 - 31 | KARET | SETIA BUDI | 1600 | 200 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam | |
| 80 | Securindo Packatama Indonesia PT | Plaza Setiabudi | Jl. HR. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan | KARET | SETIA BUDI | 782 | 500 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam | |
| 81 | Jamsostek. PT | Menara Jamsostek | Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 | KUNINGAN BARAT | MAMPANG PRAPATAN | 800 | 800 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam | |
| 82 | Securindo Packatama Indonesia PT | Gedung Cyber dth Gedung Elektrindo | Jl. Kuningan Barat No. 8 | KUNINGAN BARAT | MAMPANG PRAPATAN | 324 | 350 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam | |
| 83 | Kepland Investama. PT | International Fin Ctricks Wisma BCA | Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 | KARET | SETIA BUDI | 175 | 125 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam | |
| 84 | Kerukunan Warga Komplek Perkantoran Buncit Mas | Kompleks Perkantoran Buncit Mas | Jl. Mampang Prapatan Raya 108 | DUREN TIGA | PANCORAN | 162 | 100 | 1000 sekali parkir | 500 sekali parkir | 500 /jam | 500 /jam | |
| 85 | PT. Graha Menara Hijau | Gedung Menara Hijau (eks. Wisma Kalimatis) | Jl. MT. Haryono Kav. 33 | CIKOKO | PANCORAN | 800 | 500 | 3000 /jam | 2000 /jam berikutnya | 1000 /jam | 1000 /jam | |
| 86 | KIECWBBM. PT | Gd. Wisma Baja | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 54 | KUNINGAN TIMUR | SETIA BUDI | 87 | 125 | 2000 /jam | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam | |
| 87 | Kop. Kar. Golf Pondok Indah | Lap. Parkir PT. Pondok Indah Pradang Golf Tbk | Jl. Metro Pondok Indah | PONDOK PINANG | KEBAYORAN LAMA | 227 | | 2000 /jam | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam | |
| 88 | Kop. Peg. Dep. Kop. PK dan M | Departemen Koperasi | Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3,4,5 | KARET | SETIA BUDI | 300 | 200 | 1000 /jam | 500 /jam berikutnya | 500 sekali parkir | 500 /jam | |
| 89 | Kopsucofindo | Gedung Sucofindo | Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 | PANCORAN | PANCORAN | 250 | 250 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam | |
| 90 | Securindo Packatama Indonesia PT | Sempurna Saure PT. Seridala Lesari ex. Damemon | Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 | KERET SEMANGGI | SETIA BUDI | 1241 | 1000 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam | |
| 91 | Kulub Seniosa Seimbang PT | Misra Seniosa | Jl. Sultan Iskandar Muda | KEB. LAMA SELATAN | KEBAYORAN LAMA | 20 | 20 | TIDAK MEMUNGUT | | | | |
| 92 | Land Mark. PT | Gedung The Land Mark | Jl. Jend. Sudirman No. 1 | SETIA BUDI | SETIA BUDI | 1400 | 100 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 2000 /jam | 2000 /jam | |
| 93 | Menara Duta. PT | Menara Duta | Jl. HR. Rasuna Said Kav. B - 9 | SETIABUDI | SETIA BUDI | 246 | 113 | 3000 /jam | 3000 /jam berikutnya | 2000 /jam | 2000 /jam | 1000 |
| 94 | PT. Bumi Jawa Seniosa | Gd. Plalima One | Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4 | KUNINGAN TIMUR | SETIA BUDI | 259 | 238 | 2000 /jam | 1500 /jam | 500 /jam | 500 /jam | |
| 95 | Mitra Usaha Sarana. PT | Gd. Bank Bukopin Pusat | Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Pancoran | CIKOKO | PANCORAN | 190 | 250 | 1500 /jam | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam | |
| 96 | PT. ISS Parking Management | Gd. Mugi Griya | Jl. MT. Haryono Kav. 10 | TEBET BARAT | TEBET | 120 | 80 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam | |
| 97 | PT. Plaza 89 | Gd. Plaza 89 | Jl. HR. Rasuna Said Kav. X 7 No. 6 | KARET KUNINGAN | SETIA BUDI | 518 | 140 | 3000 /jam | 3000 /jam berikutnya | 1500 /jam | 1500 /jam | |
| 98 | GMI Mulita Persada Talestani. PT | Gd. Sentra Mulita | Jl. HR. Rasuna Said Kav. X 8 No. 6 | KARET KUNINGAN | SETIA BUDI | 645 | 200 | 4000 /jam | 3000 /jam berikutnya | 1500 /jam | 1500 /jam | |
| 99 | Mulitka Adiperdana. PT | Gedung Mulitka | Jl. Mampang Prapatan No. 71 - 73 | TEGAL PARANG | MAMPANG PRAPATAN | 120 | 200 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam | |
| | | | | | Sub Total | 11894 | 6775 | | | | | |

| NO. URUT | PERUSAHAAN | NAMA GEDUNG (LOKASI) | ALAMAT LOKASI PARKIR | KELURAHAN | KECAMATAN | SRP | | TARIP BIAYA PARKIR | | | MOTOR TAMBAHAN (Rp.) |
|----------|---------------------------------------|--|--|----------------|------------------|-------|-------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | MOBIL | MOTOR | TARIP DASAR (Rp.) | TAMBAHAN (Rp.) | TARIP DASAR (Rp.) | |
| 100 | Nico Central. PT | Gd. Menara BCD | Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 | KARET | SETIA BUDI | 254 | 180 | 3000 /jam l | 3000 /jam berikutnya | 1000 /jam | |
| | | | | | Truk/Box | 2 | | 6000 /jam l | 3000 /jam berikutnya | | |
| 101 | Omega Propertiindo. PT | Wisma Mienia | Jl. MT. Haryono Kav. 16 | TEBET | PANCORAN | 188 | 250 | 2000 /jam l | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 102 | Pantor Mas. PT | Wisna Tamara | Jl. Jend. Sudirman Kav. 24 | SETIABUDI | SETIA BUDI | 300 | 50 | 2000 /jam l | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 103 | Paramactra Mumbabadi. PT | Gedung Menara Gracia | Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 17 | KARET KUNINGAN | SETIA BUDI | 80 | 70 | 2000 | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 104 | Pawalanesia Persada. PT | Ged. Asuransi Wahana Tala | Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 4 | KARET | SETIA BUDI | 87 | 50 | 2000 /jam l | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 105 | Perhimpunan Penghuni Graha Irama | Gedung Graha Irama | Blok X - 1 Kav. 1-2 | KUNINGAN TIMUR | SETIA BUDI | 482 | 500 | 2000 /jam l | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 106 | Perhimpunan Penghuni Wisma Slaco | Wisma Slaco | Jl. Cassablanca Kav. 18 | MENTENG DALAM | TEBET | 195 | 200 | 2000 /jam l | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 107 | Pemadani Propertiindo Development. PT | Wisna Kodel | Jl. HR. Rasuna Said Kav. B - 4 | SETIABUDI | SETIA BUDI | 200 | 100 | 2000 /jam l | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 108 | Permalta Birama Sakti. PT | Plaza Lippo | Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 | KARET | SETIA BUDI | 404 | 200 | 2000 /jam l | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 109 | Permalta Birama Sakti. PT | Kawasan Mega Kuningan | Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok E 1.2 No. 1&2 | KUNINGAN TIMUR | SETIA BUDI | 247 | 150 | 2000 /jam l | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 110 | PPRSP Victoria | Gedung Victoria | Jl. S. Hasanudin 47-51 | MELAWAI | KEBAYORAN BARU | 118 | 75 | 2000 /jam l | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 111 | Praktarsa Dirgaaneka. PT | Gedung Plaza Centre (Dipin Migas Dept. ESDM) | Jl. HR. Rasuna Said Kav. B 5 | SETIABUDI | SETIA BUDI | 200 | 100 | 1000 /jam l | 500 /jam berikutnya | 200 /jam l | |
| 112 | Prasarana Grading Puri. PT | Komp. Wijaya Graha Puri Blok E No. 20 | Jl. Wijaya II | PULO | KEBAYORAN BARU | 550 | 200 | 2000 /jam l | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 113 | Pralama Mitra Sejati. PT | Wisna Tugu | Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 7-9 | KERET | SETIA BUDI | 210 | 63 | 3000 /jam l | 2000 /jam berikutnya | 1000 /jam | |
| 114 | PPRSH Kondominium Kinlamani | Kondominium Kinlamani | Jl. Prapanca Raya | PELA MAMPANG | MAMPANG PRAPATAN | 346 | 100 | | TIDAK MEMUNGUT | | |
| 115 | Dinamika Mitra Pratma. PT | Prestasi Cati Arsdan Daring Range & School | Jl. Jend. Sudirman | SENAYAN | KEBAYORAN BARU | 128 | 30 | 1500 /jam l | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| | | | | | Truk/Box | 10 | | 3000 /jam l | 2000 /jam berikutnya | | |
| 116 | Rodial Indonesia. PT | Wisna Aldiron | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 72 | PANCORAN | PANCORAN | 350 | 400 | 2000 /jam l | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam l | |
| 117 | S. Widjojo. PT | Gd. S. Widjojo | Jl. Jend. Sudirman No. 71 | SENAYAN | KEBAYORAN BARU | 150 | 190 | 2000 /jam l | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 118 | Samudranayaka Grahaunggul. PT | Graha Unilever | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 15 | KARET SEMANGGI | SETIA BUDI | 146 | 70 | 2000 /jam l | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 119 | GSI Sanggar Cipta Kreasitama. PT | Wisna Mulia | Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 | KUNINGAN BARAT | MAMPANG | 1979 | 668 | 3000 /jam l | 3000 /jam berikutnya | 1500 /jam | |
| | | | | | Truk /Box | 4 | | 4000 /jam l | 3000 /jam berikutnya | | |
| 120 | GM Sanggar Musikta Indah. PT | Gd. Menara Mulia | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. C 9 - 11 | KARET SEMANGGI | SETIA BUDI | 1156 | 800 | 3000 /jam l | 3000 /jam berikutnya | 1500 /jam | |
| | | | | | Truk /Box | 4 | | 4000 /jam l | 3000 /jam berikutnya | | |
| 121 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Graha Musikta RatuPT. Musikta Ratu Centre | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 | MENTENG BARAT | TEBET | 223 | 409 | 2000 /jam l | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 122 | Securindo Packatama Indonesia. PT | The Club StreetPT. Mudra ritelling Wira | Jl. Jend. Sudirman Kav. 74 - 75 | SENAYAN | KEBAYORAN BARU | 1200 | 120 | 2000 /jam l | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 123 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Gedung Menara ImpendiumPereburuan Pangluna M | Jl. HR. Rasuna Said | GUNTUR | SETIA BUDI | 845 | 350 | 2000 /jam l | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 124 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Menara RajawaliPT. Rajawali Adhikisma | Jl. Mega Kuningan | KUNINGAN TIMUR | SETIA BUDI | 415 | 430 | 2000 /jam l | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 125 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Gedung Graha AnasPT. Saiga Romi Propertiindo | Jl. Slegra Raya No. 31 | PEJATEN BARU | PASAR MINGGU | 36 | 15 | 1000 /jam l | 1000 /jam berikutnya | 500 sekali parkir | |
| 126 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Gedung SumitmasaPT. Sumitmasa Property | Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 | SENAYAN | KEBAYORAN BARU | 870 | 1080 | 2000 /jam l | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| | | | | | Sub Total | 11359 | 6650 | | | | |

| NO. URUT | PERUSAHAAN | NAMA GEDUNG (LOKASI) | ALAMAT LOKASI PARKIR | KELURAHAN | KECAMATAN | SRP | | TARIP BIAYA PARKIR | | | |
|----------|-----------------------------------|---|--|----------------|------------------|-------|-------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | MOBIL | MOTOR | MOBIL | | MOTOR | |
| | | | | | | | | TARIP DASAR (Rp.) | TAMBAHAN (Rp.) | TARIP DASAR (Rp.) | TAMBAHAN (Rp.) |
| 127 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Wisma Pondok Indah | Jl. Sultan Iskandar Muda Blok VI A | PONDOK PINANG | KEBAYORAN LAMA | 530 | 200 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam |
| 128 | PT. ISS Parking Management | Gedung Perkantoran Hijau Arkadia | Jl. Lejend TB Simatupang Kav 88 | KEBAGUSAN | PASAR MINGGU | 800 | 500 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam |
| 129 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Gedung Patra Jasa | Jl. Gatot Subroto Kav 32-34 | KUNINGAN TIMUR | SETIA BUDI | 530 | 400 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam |
| 130 | Securindo Packatama Indonesia PT | Gedung Bursa Elek Jakarta | Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 | SEANAYAN | KEBAYORAN BARU | 1500 | 2000 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam |
| 131 | Securindo Packatama Indonesia PT | Rukan Gedung Gajah | Jl. Dr. Saharjo No 111 | TEBET BARAT | TEBET | 400 | 440 | 2000 /jam | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam |
| 132 | Sekip Langgeng Samesia. PT | Gedung Graha Aktiva | Jl. HR. Rasuna Said Blok X - 1 Kav. 03 | KUNINGAN TIMUR | SETIA BUDI | 150 | 50 | 1000 /jam | 1000 / 1 jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam |
| 133 | Salarscapia Kreasindo. PT | Pondok Pinang Centre | Jl. Ciputat Raya Kel. Pondok Pinang | PONDOK PINANG | KEBAYORAN LAMA | 158 | 50 | 1000 /jam | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam |
| 134 | Sinar Mas Teladan. PT | Gedung Mirasaha | Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 5 | KARET | SETIA BUDI | 167 | 100 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam |
| 135 | Surya Utama Nusa Parka PT | Imeco Inter Sarana PT | Jl. TB. Simatupang No 41 | CILANDAK TIMUR | PASAR MINGGU | 625 | 320 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam |
| 136 | Serasi Tunggal Mandiri PT | Wisma Indocement | Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71 | SETIA BUDI | SETIA BUDI | 251 | 175 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam |
| 137 | Taktis. PT | Pertokoan Selmis | Jl. Asem Baris Raya No. 52 | KEBON BARU | TEBET | 30 | 1000 | sekali parkir | | | |
| 138 | GM Tridharma Sakti Indah. PT | Plaza Kuningan | Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 11 - 14 | KARET KUNINGAN | SETIA BUDI | 635 | 200 | 3000 /jam | 3000 /jam berikutnya | 1500 /jam | 1500 /jam |
| 139 | PPRS (eks Tropika Selaras. PT) | Wisma Lippo Bank (eks Gd. Citra Graha) | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | KUNINGAN TIMUR | SETIA BUDI | 500 | 250 | 2000 /jam | 2000 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam |
| 140 | Usaha Gedung Bank Dagang Negara | Gedung Bank Syariah Mandiri/Ex. Bank Suaka Bata | Jl. Sultan Hasanuddin Kav. 57 Kebayoran Baru | MELAWAI | KEBAYORAN BARU | 24 | 10 | 3000 /jam | 2000 / 1 jam berikutnya | 1000 /jam | 1000 /jam |
| 141 | Wisma Bumi Putera. PT | Wisma Bumi Putera | Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 | SETIA BUDI | SETIA BUDI | 200 | 200 | 2000 /jam | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam |
| 142 | Precise Pacific PT/Wisma Dharmala | Gedung Maya Pada Tower Gedung YTKI | Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 | KARET | SETIA BUDI | 200 | 150 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam |
| 143 | Yayasan Tenaga Kerja Indonesia | Gedung YTKI | Jl. Gatot Subroto Kav. 44 | KUNINGAN BARAT | MAMPANG PRAPATAN | 75 | 350 | 2000 | 1000 | 500 /jam | 500 /jam |
| 144 | PT. Sejahtera Alam Property | Permalita Bank TOWER I | Jl. Jend. Sudirman Kav. 27 | KARET | SETIA BUDI | 375 | 100 | 2000 /jam | 1500 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam |
| 145 | Dinamika Mitra Pratama. PT | Rumah Sakti Jakarta | Jl. Jend. Sudirman Kav. 49 | KARET SEMANGGI | SETIA BUDI | 90 | 210 | 1500 /JAM | 1000 /jam berikutnya | 500 /JAM | 500 /JAM |
| 146 | Kop. Kar. RS. MMC | RS. MMC | Jl. HR. Rasuna Said Kav. C - 21 | KARET KUNINGAN | SETIA BUDI | 106 | 77 | 2500 /jam | 2000 /jam berikutnya | 1000 /jam | 1000 /jam |
| 147 | Kop. Peg. RS. Pertamina Pusat | RS. Pertamina Pusat | Jl. Kyai Maaja No. 43 Kebayoran baru | GUNUNG | KEBAYORAN BARU | 140 | 300 | 1500 /jam | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam |
| 148 | Lentera Kasih International PT | Sekolah Lentera | Jl. Sultan Iskandar Muda No 98 | KEBAYORAN LAMA | KEBAYORAN LAMA | 50 | 15 | | TIDAK MEMUNGUT | | |
| 149 | Icon Indonesia Sejaht | RS. UP Fatmawati | Jl. RS. Fatmawati Cilandak | PONDOK LABU | CILANDAK | 200 | 300 | 3000 /jam | 2000 /jam berikutnya | 1000 /jam | 1000 /jam |
| 150 | Pratiwi Mandiri Abadi PT | RS. Setia Mitra | Jl. RS. Fatmawati No. 80-82 | CILANDAK | CILANDAK | 25 | 35 | 1500 /sekal parkir | 500 /jam berikutnya | 500 /sekal parkir | 500 /sekal parkir |
| 151 | Pos Indonesia. PT | Kantor Pos Fatmawati | Jl. RS. Fatmawati No. 10 Cilandak | CILANDAK BARAT | CILANDAK | 30 | 50 | 1500 /sekal parkir | | 500 /sekal parkir | 500 /sekal parkir |
| 152 | Pos Indonesia. PT | Kantor Pos Mampang | Jl. Kapten Tendean No. 43 | KUNINGAN BARAT | MAMPANG PRAPATAN | 6 | 15 | 1000 /sekal parkir | | 500 /sekal parkir | 500 /sekal parkir |
| 153 | RS. Medistra | RS. Medistra | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 59 | KUNINGAN TIMUR | SETIA BUDI | 150 | 250 | 1500 /jam | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | 500 /jam |
| | | | | | Sub Total | 7950 | 4747 | | | | |

| NO. URUT | PERUSAHAAN | NAMA GEDUNG (LOKASI) | ALAMAT LOKASI PARKIR | KELURAHAN | KECAMATAN | SRP | | TARIF BIAYA PARKIR | | | |
|----------|-----------------------------------|---|--|------------------|------------------|-------------|--------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | MOBIL | MOTOR | TARIF DASAR (Rp.) | TAMBAHAN (Rp.) | TARIF DASAR (Rp.) | MOTOR TAMBAHAN (Rp.) |
| 154 | RS. Tria Dipa | RS. Tria Dipa | Jl. Raya Pasar Minggu No. 3 A Pancoran | PANCORAN SELATAN | PANCORAN | 50 | 100 | 2000 /jam 1 | TIDAK MEMUNGUT | 1000 /jam | |
| 155 | Rajawali Nusantara Indonesia PT | Hanggar Teras Pancoran | Jl. Gatot Subroto No. 72 | PANCORAN | PANCORAN | 75 | 30 | 2000 /jam 1 | 1000 /jam berikutnya | 1000 /jam | |
| 156 | Sanggraha Pelita Jaya, PT | Stadion Sanggraha | Jl. Raya Jagorawi | LEBAK BULUS | CILANDAK | 200 | 300 | 500 /jam 1 | | 300 sekali parkir | |
| 157 | Securindo Packatama Indonesia, PT | RS. Pondok Indah/PT. Binara Guna Medika | Jl. Metro Duta Kav. UE | PONDOK PINANG | KEBAYORAN LAMA | 303 | 400 | 1500 /jam 1 | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 158 | Sony & Bakmi Gajah Mada | Sony & Bakmi Gajah Mada | Jl. Melawai Raya No. 38 | KEBAYORAN BARU | KEBAYORAN BARU | 15 | | 1000 sekali parkir | | Gratis | |
| 159 | Universitas Pancasila | Universitas Pancasila | Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa | SRENGSENG SAWAH | JAGAKARSA | 600 | 200 | 300 sekali parkir | | 200 sekali parkir | |
| 160 | Yayasan Bina Nusantara | Universitas Bina Nusantara | Jl. Sultan Iskandar Muda Kav G 8 | GROGOL SELATAN | KEBAYORAN LAMA | 200 | 100 | | TIDAK MEMUNGUT | | |
| 161 | PPKP Adhi Graha | Gedung Adhi Graha | Jl. Jend. Gatri Suboto Kav.56 | Pancoran | Pancoran | 180 | 300 | 2000 /jam 1 | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 162 | Yayasan Syifa Budi | Lahan idur ex Asrama POM ABRI | Jl. Prapatca V | PELA MAMPANG | MAMPANG PRAPATAN | 200 | 100 | | TIDAK MEMUNGUT | | |
| | | | | | | 1823 | 1530 | | | | |
| | | | | | | 63.431 | 39.538 | | | | |
| | | | | | | Jumlah | | | | | |
| | | | | | | Dipindahkan | | | | | |

SELATAN

| NO. | PERUSAHAAN | NAMA LOKASI | ALAMAT LOKASI | KELURAHAN | KECAMATAN | NAMA PEMANGGUNGJAWAB | SRP | | TARIF BIAYA PARKIR | | | | |
|-----|-----------------------------------|----------------------------|--|----------------|------------------|---------------------------|--------|--------|--------------------|---------|-------------|----------|---------------|
| | | | | | | | MOBIL | MOTOR | MOBIL | MOTOR | TARIF DASAR | TAMBAHAN | TAMBAHAN |
| | Pindahan | | Pindahan | | | | | | | | | | |
| 163 | Cibank Melawai | Gedung Citibank | Jl. Melawai Raya No. 6C Kebayoran Baru | Kramat Pela | Kabupaten Baru | Myntca Lopian | 63.431 | 39.538 | | | | | |
| 164 | PT. Merlynn Park Hotel | Manhattan Hotel | Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 19-24 Setia Budi | Karet Kuningan | Setia Budi | Maja Ramchand | 17 | 10 | | | | | |
| 165 | PT. Securindo Packatama Indonesia | Darmawangsa Square | Jl. Darmawangsa VI-X No. 64 | Pulo | Kabupaten Baru | Toni Juatja | 150 | 50 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2000 | sekali parkir |
| 166 | PT. Securindo Packatama Indonesia | Rukan Plaza Pondok Indah V | Jl. Margaguna Kebayoran Baru | Gandaria Utara | Kabupaten Baru | Toni Juatja | 250 | 140 | 2.000 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| 167 | PT. Adwira Sempurna | Rukan Permata Serayan | Jl. Arteri Pondok Indah (Patal Serayan) Kebayoran Lama | Grogol Utara | Kebayoran Lama | Nurachmat | 528 | 300 | 2.000 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| 168 | PT. Boston Nusantara | Gedung Baiji Kartini | Jl. Gatot Subroto Kav. 37 Setiabudi | Kuningan Timur | Setiabudi | Muhammad Fauzan | 550 | 300 | 2.000 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| 169 | PT. Graha Niaga Tata Utama | Gedung Graha Niaga | Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 | Senayan | Keb. Baru | Bambang Soejanto | 607 | 439 | 2.000 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| 170 | PT. Provinces Indonesia | Wisma Bakri | Jl. HR Rasjuna Said | Setiabudi | Setiabudi | Salut Badarudin | 418 | 350 | 2000 | 1500 | 500 | 500 | 500 |
| 171 | PT. Securindo Packatama Indonesia | Boga Catur / kem chic | Jl. Kemang Raya No.3 | Pela Mampang | Mampang Prapatan | Toni Juatja | 381 | 159 | 2000 | 2000 | 2000 | 500 | 500 |
| 172 | PT.SPI | Polin Square | Jl. Lingkar Luar Sel | Lbk Bulus | Cilandak | Toni Juatja | 1.100 | 300 | 2000 | 2000 | 2000 | 500 | 500 |
| 173 | PT.Mahakam Eka Graha | Hotel Grand Mahakam | Jl. Mahakam I No.6 | Kramat Pela | Kab Baru | Edi Susanto | 40 | 20 | 2000 | 2000 | 2000 | 500 | 500 |
| 174 | PPRSP Perkantoran 33 | The Bellezza Permata Hijau | Jl. Mega Kuningan Lot 8.6-8.7 | Kuningan Tmr | Setiabudi | Ricard Batiro Suryo | 328 | 350 | 2000 | 1500 | 500 | 500 | 500 |
| 175 | PT. SPI | Gedung Lina | Jl. Lelend Soepono No.34 | Grogol Utara | Keb Lama | Toni Juatja | 997 | 950 | 2000 | 2000 | 2000 | 500 | 500 |
| 176 | PT. Sacha Graha Eka | Tepusan Plaza | Jl. HR Rasjuna Said Kav B 7 | Setiabudi | Setiabudi | Bonar Paulus Solona | 150 | 50 | 2000 | 2000 | 2000 | 500 | 500 |
| 177 | PT. Sentra Cakrawala | Kemang Club Villas | Jl. Kapten Tendean No.45 | Kuningan Brt | Mampang Prapatan | Lulu Sasmita | 100 | 150 | 2000 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 178 | PT. Surya Utama Nusaparka | Apertemen Bellagio Maesion | Jl. Kemang Sel 1 | Bangka | Mampang Prapatan | Heri Istano | 50 | 100 | 2000 | 2000 | 2000 | 500 | 500 |
| 179 | PT. Centra Lingga Perkasa | Gedung Menara Karya | Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok E.6 - 1 | Kuningan Tmr | Setiabudi | Amin Maulana | 122 | 100 | 2000 | 2000 | 2000 | 500 | 500 |
| 180 | PT Securindo Packatama Indonesia | Gedung Menara Karya | Jl. HR Rasjuna Said Blok X - 1 Kav. 1 | Kuningan Timur | Setiabudi | Toni Juatja | 441 | 400 | 2000 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 181 | PT. Kinarya Selaras Piranti | Gedung Kinarya Selaras | Jl. TB Simatupang No.4 | Cilandak Brt | Cilandak | Agus Rhamdany | 25 | 180 | 2000 | 1500 | 500 | 500 | 500 |
| 182 | RSIA Yadika Keb. Lama | RSIA Yadika | Jl. Ciputat Raya No.5 | Keb Lama Sel | Kebayoran | Dirg. Tiambun K Mangunsc | 32 | 27 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| 183 | PT. Cemara Nanduania | Gedung Aktroi Plaza | Jl. Kemang Utara Raya No. 1 | Bangka | Mampang Prapatan | Soebayanto, SE | 50 | 30 | 2000 | 1 x Prk | 3.000 | 1.000 | 1.000 |
| 184 | PT. Chiatex Perh | Menara Standard Chartered | Jl. Prof. Dr Satrio No. 164 | Karet Semanggi | Setiabudi | Yohanes Wahyu | 895 | 150 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 |
| 185 | PT. Jakarta Land | Pelita | Jl. Pelita Jakarta Selatan | Karet | Setiabudi | Usman Saleh | - | 1.000 | - | - | - | 500 | 500 |
| 186 | PT.SPI | OakWood Primer Cosmo Jkl | Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok E.4.2 | Kuningan Tmr | Setiabudi | Toni T. qri Tobagus Okkie | 314 | 150 | 5000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 187 | PT.SPI | Menara Prima | Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 | Kuningan Tmr | Setiabudi | Toni Juatja | 448 | 300 | 2000 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 188 | PT.SPI | Ged. Iskandarsyah | Jl. Iskandarsyah Raya No.66 C | Melawai | Setiabudi | Toni Juatja | 140 | 120 | 2000 | 2000 | 1000 | 500 | 500 |
| 189 | PT. Rahajia Property Management | Ged. Wisma Rahajia | Jl. TB Simatupang Kav.1 | Cilandak Tmr | Keb Baru | Nasser Jaifar Seff | 175 | 200 | 2000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| 190 | Rumah Sakit Tebet | RS Tebet | Jl. MT. Haryono Kav. 13 | Tebet Brt | Per Minggu | Dr. Batunahai PP Gultom | 77 | 100 | 1500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| 191 | PT. SPI | Fatmawati Mas | Jl. Rs. Fatmawati No.20 | Cilandak Brt | Cilandak | Toni Juatja | 200 | 100 | 2000 | 1500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | 72.210 | 46.183 | | | | | |

| NO. | PERUSAHAAN | NAMA LOKASI | ALAMAT LOKASI | KELURAHAN | KECAMATAN | NAMA PENANGGUNGJAWAB | SRP | | TARIF BIAYA PARKIR | | | |
|-----|--|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------|-------|--------------------|-----------|-------|-------------|
| | | | | | | | MOBIL | MOTOR | MOBIL | | MOTOR | |
| | | | | | | | | | TARIF DASAR | TAMBAHAN | | TARIF DASAR |
| 192 | PT. SPI | Golden Truly Fatmawati | Jl. RS. Fatmawati No. 15 | Gandaria Selatan | Cilandak | Toni Juatja | 600 | 500 | 2000 | 2000 | 500 | 500 |
| 193 | PT. SPI | Hero Lebak Bulus | Jl. Raya Karang Tengah I | Lebak Bulus | Cilandak | Toni Juatja | 53 | 22 | 2000 | 2000 | 500 | 500 |
| 194 | PT. SPI | Permata Kuningan | Jl. Kuningan Mulia Kav.9C | Guntur | Sela Budi | Toni Juatja | 540 | 100 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 195 | PT. SPI | Hero Cilandak | Jl. Raya RS. Fatmawati 30 | Cilandak Barat | Cilandak | Toni Juatja | 23 | 53 | 2000 | 2000 | 500 | 500 |
| 196 | PT. Tangel Auto Parking | Gedung Mitra | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21 | Karet | Setiabudi | MB. Setia Dharma | 400 | 600 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 197 | PT. Hotel Lokasari Indonesia | Hotel Lokasari Blok M. | Jl. Panglima Polim No. 3 | Melawai | Keb Baru | Asep Nundang | 14 | 20 | 1.500 | 1.000 | 500 | 500 |
| 198 | Unit Katolik Indonesia | Univ Atmajaya | Jl. Jend. Sudirman No.51 | Krt Semanggi | Setiabudi | Phillipus Novi Purwanto | 57 | 1.067 | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 |
| 199 | PT. Parkasa Internusa Mandiri | Carrefour Psr Minggu | Jl. Raya Psr Minggu Km. 18. No.9 | Pejaten Bt | Psr Minggu | Kurnia Sukrisna | 200 | 150 | 2.000 | 1.500 | 500 | 500 |
| 200 | PT. ISS Parking Management International | Sudirman Tower Condominium | Jl. Garnisun No. 8 | Karet Semanggi | Setiabudi | Agus Widodo | 700 | 150 | 2.000 | 1.500 | 500 | 500 |
| 201 | PT. Yamaha Musik Indonesia | Ged. Yamaha Musik Center | Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 4 | Karet Semanggi | Setiabudi | Adiway Hoegeng | 115 | 20 | 2.000 | 1x parkir | 500 | 1x parkir |
| 202 | Distribusi | Recapital Building | Jl. Adiyawarman No. 55 | Melawai | Kebyaran Baru | Suwarda | 120 | 100 | 2.000 | 1.500 | 500 | 500 |
| 203 | PT. Dinamika Mitra Pratama | La Codefin | Jl. Kemang Raya No.8 | Kemang | Keb Baru | Erwin Mandhakarta | 150 | 200 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 204 | PT. SPI | Gedung Kantor Oleos I | Jl. Raya Mampang Prapatan No.139 | Kalibata | Pancoran | Toni Juatja | 69 | 70 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 205 | PT. SPI | Prudential Tower | Jl. Jend Sudirman Kav.79 | Setiabudi | Setiabudi | Toni Juatja | 319 | 275 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 206 | PT. SPI | Talavera Office Park | Jl. TB Simatupang Kav.22 - 28 | Cilandak Bt | Cilandak | Toni Juatja | 619 | 292 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 207 | PT. SPI | NISP Tower | Jl. Prof. Dr. Saefi Kav.25 | Karet Kuningan | Setiabudi | Toni Juatja | 215 | 150 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 208 | PT. Api Metro Graha | Ged. The Energy | Jl. Jend Sudirman SCBD Lot.II | Senayan | Keb Baru | Bam.bang Thwbagyo | 1.100 | 500 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 209 | PT. Secundo Packalama Indonesia | Gedung Phillips & Tetra Park | Jl. Buncit Raya Kav. 99-100 | Pejaten Bt | Psr Minggu | Toni Juatja | 200 | 250 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 210 | PT. Secundo Packalama Indonesia | Beliagio Mega Kuningan | Jl. Mega Kuningan Barat Kav E4 | Kuningan Tmr | Setiabudi | Toni Juatja | 1.234 | 150 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 211 | Perorangan | Restoran dan Perbelanjaan | Jl. Tebet Raya No.55 - 57 | Tebet Tmr | Tebet | Fachrudin Latif | 10 | 10 | 1000 | 1x Pkr | 500 | 500 |
| 212 | PT. Pede Realty | Ged. Wisma Pede | Jl. MT Haryono | Tebet Bt | Tebet | Johnos T Siahaan | 107 | 100 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 213 | PT. Five Pillars Indonesia Office Park | Ged. Mulia Business Park | Jl. MT Haryono Kav.58 - 59 | Pancoran | Psr Minggu | Ir. Melleward Ester Budiman | 510 | 475 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 |
| 214 | Kop. Kar. PT. Flist. Jkt International | Gedung B E J | Jl. Jend Sudirman Kav.52 - 53 | Senayan | Keb. Baru | Tride/Box | 2 | 800 | 4000 | 3000 | 500 | 500 |
| 215 | PT. Wana Mitra Permal | Ged. Menara Palma | Jl. HR. Rasuna Said Blok X.2 | Kuningan Tmr | Setiabudi | Much Jamil | 329 | 300 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 216 | PT. Tifa Arum Realty | Ged. Tifa | Jl. Kuningan Barat No.28 | Kuningan Bt | Mampang Prapatan | Chevy Damadi | 5 | 300 | 3000 | 2000 | 500 | 500 |
| 217 | PT. Secundo Packalama Indonesia | Infinia Park | Jl. Dr. Sahardjo No.45 | Tebet | Manggarai | Budiman | 250 | 300 | 2000 | 1000 | 500 | 500 |
| 218 | PT. ISS Parking Management | Ratu Prabu 2 | Jl. TB Simatupang Kav. XX | Cilandak Bt | Psr Minggu | Toni Juatja | 288 | 148 | 2000 | 1000 | 500 | 500 |
| | | | | | | Agus Widodo | 50 | 399 | 3000 | 2000 | 1500 | 500 |
| | | | | | | | 9.198 | 7.193 | | | | |

| NO. | PERUSAHAAN | NAMA LOKASI | ALAMAT LOKASI | KELURAHAN | KECAMATAN | NAMA PENANGGUNGJAWAB | SRP | | TARIF BIAYA PARKIR | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------|-------|--------------------|---------|-----|---------|
| | | | | | | | MOBIL | MOTOR | MOBIL | MOTOR | | |
| 255 | PT. Aksesindo Prima Lestari | Tamansari Sudirman Residence | Jl. Bek Murad No.42 Karet Kuningan | Karet Kuningan | Setiabudi | Istono SE | 70 | 15 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 256 | PT. Surya Sentosa | Apartemen Gardenia | Jl. Wianung Jati No.12 | Jati Padang | Pasar Minggu | Yosen S. Hartono | 200 | 100 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 257 | PT. Ambhara Tharuna | Hotel Ambhara | Jl. Iskandarsyah Raya No.1 | Melawai | Kebayoran Baru | Ahmad Dipoditiro | 43 | 118 | TIDAK MEMUNGUT | | | |
| 258 | PT. Karuniparking Anta Surya | Graha Codefin | Jl. HR. Rasuna Said Kav. B.3 | Karet Kuningan | Setiabudi | Gustiansyah D. Kameron | 76 | 100 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 259 | PT. Pede Realty | Pelataran parkir Gd. Wisma Pede | Jl. Tebet Barat Dalam RT.010/005 | Tebet Barat | Tebet | Johnas T. Siahaan | 10 | 145 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 260 | PPRS Apart. Brawijaya | Apartemen Brawijaya | Jl. Brawijaya XII No.1 | Pulo Keb Baru | Kebayoran Baru | Fanida Zaituri | 156 | 100 | TIDAK MEMUNGUT | | | |
| 261 | PT. Aksesindo Prima Lestari | Fatmawati Festival | Jl. RS Fatmawati No. 50 | Cilandak | Cilandak | Istono SE | 105 | 100 | 2000 | 1000 | 500 | 500 |
| 262 | PT. Dinamika Mitra Pratama | Graha Mobilis | Jl. wanung buncit Raya | Mampang | Mampang Prapatan | Erwin Manchakarta | 185 | 350 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 263 | PT. Gerbang Berkah Solusi | Menara 165 | Jl. TB Simatupang Kav. 1 | Cindk Timur | Per Minggu | Firdaus SE.MM | 175 | 130 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 264 | PT. Securnndo Packatama Indonesia | Rasuna Epicentrum | Jl. HR Rasuna Said | Krt Kuningan | SelaBudi | Toni Juaya | 1.200 | 400 | 2000 | 2000 | 500 | 500 |
| 265 | PT. Selaras Perdana | Plaza Alston | Jl. TB Simatupang Kav. Ls 1 | Pndk Pinang | Keb. Lama | Gandi Rudliarto | 65 | 75 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 266 | PT. Surya Loka Mas | Ruko Sentra Arteri mas | Jl. Sultan Iskandar Muda | Keb.Lama Selatan | Keb. Lama | Robby Jedja | 40 | 35 | 2000 | x masuk | 500 | x masuk |
| 267 | PT. Center Park Corporat | Kuningan City | Jl. Prof Dr Satnio kav. 18 | Setiabudi | Selta Budi | Edi alpinsi | 2329 | 850 | 2000 | 2000 | 500 | 500 |
| 268 | PT. Sekip Langgeng Semesta | Gd. Graha Aktiva | Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav.3 | Setiabudi | Selta Budi | Andrian N. Wibisono | 160 | 50 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 269 | PT. Securnndo Packatama Indonesia | Plaza 2 Pondok Indah | Jl. Metro Pondok Indah | Pdk Pinang | Keb. Baru | Toni Juaja | 330 | 350 | 2000 | 2000 | 500 | 500 |
| 270 | PT. Securnndo Packatama Indonesia | Gd. Tempo Scan Tower | Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3-4 | Setiabudi | Selta Budi | Toni Juaja | 476 | 375 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 271 | PT. Multika Aiperdana | Gd. Mutara | Jl. Mampang Prapatan Raya No.10 | Mampang | Mampang Prapatan | Drs. Yudo Ukomo | 44 | 105 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 272 | PT. Panca Artha Abadi | Gd. Kav B 6 | Jl. HR. Rasuna Said Kav B6 | Krt Kuningan | SeltaBudi | Edwardo Soewono | 70 | 25 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 273 | PT. Puspa Artha Karya | PD Pasar Jaya Psr Pdk Labu | Jl. Fatmawati Cilandak | Cilandak | Pasar Minggu | Martien Seliawan Jjoeng | 80 | 70 | 1500 | 1000 | 500 | 500 |
| 274 | PT. Puspa Artha Karya | PD Pasar Jaya Pasar Minggu | Jl. Raya Pasar Minggu | Pasar Minggu | Pasar Minggu | Martien Seliawan Jjoeng | 30 | 250 | 1500 | 1000 | 500 | 500 |
| 275 | PT. Adiwira Sempurna | Apartemen Tamian Rasuna | Jl. HR. Rasuna Said | Krt Kuningan | SeltaBudi | Richard Kosasih | 184 | 400 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| | | | | | | sub jumlah | 6.038 | 4.143 | | | | |

| NO. | PERUSAHAAN | NAMA LOKASI | ALAMAT LOKASI | KELURAHAN | KECAMATAN | NAMA PENANGGUNGJAWAB | SRP | | TARIF BIAYA PARKIR | | | |
|-----|-----------------------------------|--|--|----------------|------------------|----------------------|-------|-------|--------------------|----------|-------|----------|
| | | | | | | | MOBIL | MOTOR | TARIF DASAR | TAMBAHAN | MOTOR | TAMBAHAN |
| 276 | PT. Triticarya Unggul Mandiri | Rukan Crown Palace | Jl. Prof. Dr. Soepomo SH. No. 231 | Tebet barat | Tebet | Ferry Susanto | 160 | 120 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 277 | PT. Provicees Indonesia | Area Parkir Rasuna Office Park & Hotel | Jl. Menteng Atas RT 03/011 | Menteng Atas | Setiabudi | Salut Badarudin | 187 | 260 | 2000 | 2000 | 500 | 500 |
| 278 | PT. Delapan Pancuran Mas | PD. Pasar, Pasar Blok A | Jl. Raya Panglima Polim | Keb. Baru | Keb. Baru | Soehermanto | 15 | 100 | 1500 | 1000 | 500 | 500 |
| 279 | PT. Master Parking Indonesia | Sovereign Plaza Cilandak | Jl. TB. Simatupang Kav. 36 | Cilandak | Pasar Minggu | Simon Bero. SE | 208 | 100 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 280 | PT. Chitalex Peni | Phe Tower | Jl. TB. Simatupang Kebagusan | Kebagusan | Pasar Minggu | Turniady Wicjaya | 329 | 150 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 |
| 281 | PT. JGC Indonesia | Gedung JGC | Jl. TB. Simatupang No.7-8 | Cilandak Barak | Pasar Minggu | I. Nuridin Hafja | 144 | 278 | TIDAK MEMUNGUT | | | |
| 282 | PT. Indosemar Mulia Karya | Amos Cozy Hotel | Jl. Melawai Raya No. 83-85 | Melawai | Kebayoran Baru | Dra. Khoe Ribka | 41 | 100 | TIDAK MEMUNGUT | | | |
| 283 | PT. Pakkodian | Cervindo Village Apartemen | Jl. KH. Abdullin Syafei Kav.27 | Tebet Barat | Tebet | Gaffar Rizami. SH | 236 | 7 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
| 284 | PT. Securindo Packatama Indonesia | 18 PARC SCBD | Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 | Senayan | Keb. Baru | Toni Tjuatja | 247 | 300 | 3000 | 3000 | 1000 | 2000 |
| 285 | PT. Chitalex Peni | Sebidang Lahat Kosong | Jl. Sepat Kebagusan | Kebagusan | Pasar Minggu | Yohanes Wahyu Tanoto | 120 | | 3000 | 2000 | | |
| 286 | PT. Securindo Packatama Indonesia | Mall kota casablanca | Jl. Casablanca Kav 9-10 | Menteng Dalam | Tebet | Toni Tjuatja | 3.700 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| 287 | PT. Metroland Permai | Pasar mayestik | Jl. Tebah No. 1/Pr mayestik | Gunung | Kebayoran Baru | Hanny Batima | 155 | 450 | 6.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 |
| 288 | PT. Bina Karya Swadaya | Komplek Bidakara | Jl. Raya Rasamala Kom Bidakarya | Menteng Atas | Tebet | Wiyono | | 682 | | | 1.000 | 1.000 |
| 289 | PT. Gedung Bank Eksim | Graha Mampang | Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100 | Duren Tiga | Pancoran | Joko Warsito | 85 | 220 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 |
| 290 | PT. Karya Tumbuh Bersama Ind. | Cilandak Mall | Jl. Raya Cilandak KKO Pasar Minggu | Cilandak Timur | Pasar Minggu | Willy Hanjaya | 180 | 144 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 |
| 291 | PT. Arco Quality parking | Colony | Jl. Kemang Raya No. 6 mampang prapatan | Bangka | Mampang Prapatan | Arnold Cornelis | 20 | 10 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 |
| 292 | PT. Indomarco Prisma Tama | Indomaret point Ampere | Jl. Raya Ampere no. 135 pasar Minggu | Paguar | Pasar Minggu | Santoso Wibowo | 35 | 54 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| 293 | PT. Securindo Packatama Indonesia | Menara Dea | Jl. Mega Kemang kav. 643 No. 1-2 Setiabudi | Kuningan Timur | Setiabudi | Toni Tjuatja | 309 | 350 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 |
| 294 | PT. Rajawali Nusantara Indonesia | Gedung BNI | Jl. Denpasar Raya Kav. Dili Setiabudi | Kuningan Timur | Setiabudi | Arief Setiyanto | 130 | 140 | | | | |
| 295 | PT. Securindo Packatama Indonesia | Pizza Hut | Jl. Gatot Subroto Kav. 1000 Tebet | Menteng Dalam | Tebet | Toni Tjuatja | 56 | 82 | 3000 | 2000 | 2000 | 1000 |
| 296 | PT. Securindo Packatama Indonesia | Ged. K-Link Tower | Jl. Gatot Subroto Kav 59A Setiabudi | Kuningan Timur | Setiabudi | Toni Tjuatja | 290 | 750 | 6000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| 297 | PT. Securindo Packatama Indonesia | Ged. Oleos 2 | Jl. Kebagusan I No. 6 Pasar Minggu | Kebagusan | Pasar Minggu | Toni Tjuatja | 30 | 89 | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 |
| 298 | PT. Wika Realty | Tamansar Semanggi Apart | Jl. ARI No. 134 Setiabudi | Karet Semanggi | Setiabudi | Budi Sadeva | 600 | 400 | 3000 | 2000 | 2000 | 1000 |
| 299 | PT. ISS Parking Management | Wisma IKPT | Jl. MT Haryono kav 4-5 Tebet | Kebon Baru | Tebet | Agus Widodo | 100 | 150 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| 300 | PT. Dinamika Mitra Pratama | Fairground | Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 | Senayan | Keb. Baru | Erwin Manchakarta | 90 | | 4000 | 3000 | | |
| 301 | PT.SPI | Kemang Village | Jl P. Antasari No. 36 | Bangka | Mampang Prapatan | Toni Tjuatja | 2.500 | 2.000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 |
| 302 | PT. Trihamas Finance | Trihamas Building | Jl. TB Simatupang Kav.11 | Tig Barat | Jagakarsa | Agus Dwi Wahyubisono | 71 | 85 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 |
| 303 | PT. Securindo Packatama Indonesia | IFC Building | Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 | Karet | Setiabudi | Toni Tjuatja | 237 | 225 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 |
| | | | | | | | 5 | 5 | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 |

| NO. | PERUSAHAAN | NAMA LOKASI | ALAMAT LOKASI | KELURAHAN | KECAMATAN | NAMA PENANGGUNGJAWAB | SRP | | TARIF BIAYA PARKIR | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------------|----------|
| | | | | | | | MOBIL | MOTOR | MOBIL | MOTOR | TARIF DASAR | TAMBAHAN |
| 331 | PT. ISS Parking Management | Jl. Jend. Gatot Subroto | Snesco Promotion Center Jl. Jend. Gatot Subroto | Pancoran | Pancoran | Agus widodo | 370 | 300 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 |
| 332 | PT.SPI | Jl. mangga dua abdad no. 14 | The Promenade, Jl. Warung buncit no. 98 Mampang | Mampang | Duren Tiga | tony tuatja | 83 | 200 | 4000 | 2000 | 4000 | 1000 |
| 333 | PT.SPI | Jl. mangga dua abdad no. 14 | Gembira Garasi, Jl. Kemang Raya No. 66 Mampang prapatan | Bangka | mampang Prapatan | tony tuatja | 48 | - | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 334 | PT.SPI | Jl. mangga dua abdad no. 14 | Salem Hospital 178 Simatupang, Jl. B.A. Kertika No. 8 Cilandak barat | Cilandak | Cilandak Barat | tony tuatja | 150 | 50 | 3000 | 2000 | 3000 | 1000 |
| 335 | PT.SPI | Jl. mangga dua abdad no. 14 | Menara megah syariah, Jl. HR Rasuna Said Kav. 184 setiabudi | Kuningan Timur | Setia Budi | tony tuatja | 84 | - | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 336 | PT.Arianti mega perkasa | Jl.adityawarman I no.42 | Wisma adityawarman | Melawai | Kebayoran baru | andrew hutagalung | 21 | 25 | Tidak memungut | | | |
| 337 | PT.SPI | Jl. Mangga Dua Abdad No. 14 | Jl.KH.M.Syafi'i Hadzani no.11 Park Residences | Kramat Pela | Kebayoran Baru | toni tuatja | 35 | 187 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000 |
| 338 | PT.SPI | Jl. Mangga Dua Abdad No. 14 | Jl.Hr.Rasuna said kav.1B /Allianz Tower | Guntur | Setia budi | toni tuatja | 303 | 240 | 5000 | 4000 | 5000 | 2000 |
| 339 | PT.SPI | Jl. Mangga Dua Abdad No. 14 | Jl.P.Polim raya /Grand Panglima Polim | Pulo | Kebayoran Baru | toni tuatja | 6 | 80 | 7000 | 3000 | 4000 | 2000 |
| 340 | PT.SPI | Jl. Mangga Dua Abdad No. 14 | Jl.Raya Kebagusan/Apartement Kebagusan City | Pasar Minggu | Pasar Minggu | toni tuatja | 300 | 200 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 |
| 341 | PT.SPI | Jl. Mangga Dua Abdad No. 14 | Jl.Lelend.TB.Simatupang kav.99.95/GM Green Tower | Kebagusan | Pasar Minggu | toni tuatja | 203 | 77 | 5000 | 4000 | 5000 | 2000 |
| 342 | PT.Grahabuana adiperkasa | Jl.HR.Rasuna said kav.12 | Gedung Lippo Kuningan | Karet Kuningan | Setiabudi | Lim Perengkuan | 375 | - | 5000 | 4000 | 5000 | 0 |
| 343 | PT.SPI | Jl. Mangga Dua Abdad No. 14 | Jl.Prof.Dr.Satrio kav.4 /Lahan kosong parkir motor kav.4 | Karet Kuningan | Setiabudi | toni tuatja | - | 600 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 344 | PT.Arianti mega karya Lestari | Jl.TB. Simatupang no.18 | Gedung D.BRASCO | Cilandak Barat | Cilandak | Timotius Tukijan,SE | 40 | 40 | 3000 | 3000 | 3000 | 1000 |
| 345 | PT.SPI | Jl. Mangga Dua Abdad No. 14 | Jl.TB.Simatupang no.53A/Plaza Oleos Tower 1 | Kebagusan | Pasar Minggu | toni tuatja | 659 | 489 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000 |
| 346 | Hotel losari blok 2 | Jl.Sultan Hasanuddin no.30 | Hotel Losari Blok 2 | Melawai | Kebayoran Baru | Iman Surachman | 4 | 30 | Tidak Memungut | | | |
| 347 | PT.SPI | Jl. Mangga Dua Abdad No. 14 | Jl.HR.Rasuna said /Thyasa office & Gallery | Karet Kuningan | Setiabudi | toni tuatja | 50 | 80 | 5000 | 4000 | 5000 | 2000 |
| 348 | PT.SPI | Jl. Mangga Dua Abdad No. 14 | Kawasan SCBD Lot 17 /Grand Lucky Superstore | Senayan | Kebayoran Baru | toni tuatja | 189 | 245 | 5000 | 4000 | 5000 | 2000 |
| 349 | PT.SPI | Jl. Mangga Dua Abdad No. 14 | Jl.Kuningan milia kav.9 B/Multivision Tower | Guntur | Setiabudi | toni tuatja | 400 | 100 | 5000 | 4000 | 5000 | 2000 |
| 350 | PT.SPI | Jl. Mangga Dua Abdad No. 14 | Jl.HR.Rasuna said/Bakti Tower | Karet Kuningan | Setiabudi | toni tuatja | 850 | 685 | 4000 | 3000 | 4000 | 2000 |
| 351 | PT.SPI | Jl. Mangga Dua Abdad No. 14 | Jl.HS.Ariawati no.1/Apartement The Aspen Residences | Pondok Labu | Cilandak | toni tuatja | 153 | 50 | 6000 | 3000 | 6000 | 2000 |
| 352 | PT.SPI | Jl. Mangga Dua Abdad No. 14 | Jl.TB.Simatupang no.5/AD Premier | Ragunan | Pasar Minggu | toni tuatja | 253 | 357 | 5000 | 4000 | 5000 | 2000 |
| 353 | PT.Centerpark citra corpora | Jl.Pengadegan tmr I no.30 | Apartement Reverside Pancoran | Pangadegan | Pancoran | Iwan Iwanto | 105 | 150 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |

| NO. | PERUSAHAAN | NAMA LOKASI | ALAMAT LOKASI | KELURAHAN | KECAMATAN | NAMA PENANGGUNGJAWAB | SRP | | TARIF BIAYA PARKIR | |
|-----|----------------------------------|---------------------------------|--|-----------|----------------|-------------------------|---------|--------|--------------------|----------------|
| | | | | | | | MOBIL | MOTOR | TARIF DASAR MOBIL | TAMBAHAN MOBIL |
| 354 | PT. Etika Karya Utama | Jl. Dharmawangsa VIII no. 5 | Apartment The Residence At Dharmawangsa Tower II | Pulo | Kebayoran Baru | Erwan Abdi Negoro Kalam | 211 | 26 | Tidak Memungut | |
| 355 | PT. Binaputri Lestari | Jl. Dharmawangsa VIII no. 39 | Apartment The Residence At Dharmawangsa Tower I | Pulo | Kebayoran Baru | Ir. Beni Dahlan | 176 | 50 | Tidak Memungut | |
| 356 | PT. ISS Parking Management | Jl. Lestari MT. Haryono Kav. 22 | Gedung Nindya Karya | Cawang | Kramat Jati | Agus Widodo | 80 | 100 | 4000 | 2000 |
| 357 | PT. Puri Dharmawangsa Raya Hotel | Jl. Brawijaya Raya no. 26 | Hotel Dharmawangsa | Pulo | Kabuyoran Baru | Bambang Supriatmoko | 100 | 200 | Tidak Memungut | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Sub Total | 23.235 | 25.873 | | |
| | | | | | | TOTAL | 126.447 | 96.376 | | |

DATA PENYELENGGARA PERPAKIRAN DI LUAR BADAN JALAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

| NO. URUT | PERUSAHAAN | NAMA GEDUNG (LOKASI) | ALAMAT LOKASI PARKIR | KELURAHAN | KECAMATAN | SRP | | TARIP BIAYA PARKIR | | | |
|-----------|-----------------------------------|---|--|------------------------|-------------|-------|-------|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | Mobil | MOTOR | TARIP DASAR (Rp.) | TAMBAHAN (Rp.) | TARIP DASAR (Rp.) | MOTOR TAMBAHAN (Rp.) |
| 1 | Aktr Pratama. PT | Yogya Dept. Store | Jl. Pahlawan Revolusi No. 15 Pondok Bambu | PONDOK BAMBUR | DUREN SAWIT | 30 | 20 | 2000 | sekalı parkir | 500 | sekalı parkir |
| 2 | Aton Paramita Group. PT | Aton Mall | Jl. Pemuda Kav. 3-4 Rawamangun | RAWAMANGUN | PULO GADUNG | 130 | 40 | 2000 | /1 jam 1 | 2000 | jam berikutnya |
| 3 | PT. SPI | Plaza Jatinegara | Jl. Matraman Raya No. 173 - 175 | BALIMESTER | JATINEGARA | 456 | 150 | 2000 | jam 1 | 2000 | jam berikutnya |
| 4 | Indotraco Sakti Sempurna. PT | Pasar / gudang Beras | Jl. Pisangan Timur Cipinang | PISANGAN TIMUR | PULO GADUNG | 40 | 50 | TIDAK MEMUNGUT | | | |
| 5 | GP Karya Parkir Semesta. PT | Hero Cipinang | Jl. Raya Lap. Tembak Cibubur | CIPINANG BESAR SELATAN | JATINEGARA | 30 | 35 | 1000 | jam 1 | 1000 | jam berikutnya |
| 6 | Komplek Ruko Bonagabe | Ramayana Cibubur | Jl. Raya Lap. Tembak Cibubur | CIRACAS | CIBUBUR | 52 | 90 | 1000 | jam 1 | 1000 | jam berikutnya |
| 7 | Pentokoan Pulo Mas | Areal Komp. Ruko Bonagabe | Jl. Jabnegara Timur No. 101 Blok. A. 9-10 | BALIMESTER | JATINEGARA | 50 | 100 | 2000 | jam 1 | 1500 | jam berikutnya |
| 8 | Kobame Propertindo PT | Pert. Pulo Mas | Jl. Penjubs Kemerdekaan No. IX | PULO GADUNG | PULO GADUNG | 250 | 250 | 1000 | jam 1 | 2000 | jam berikutnya |
| 9 | Prakarsa Digaaneka. PT | Mal Cijantung | Jl. Pendidikan 1 No. 1 | CIJANTUNG | PASAR REBO | 250 | 150 | 2000 | jam 1 | 2000 | jam berikutnya |
| 10 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Toko Buku Gramedia | Jl. T.B. Simatupang 57 Pasar Rebo | GEDONG | PASAR REBO | 230 | 150 | 2000 | sekalı parkir | 500 | sekalı parkir |
| 11 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Securindo Packatama Indonesia. PT | Jl. Matraman Raya 46-50 | KEBON MANGGIS | MATRAMAN | 170 | 220 | 2000 | jam | 2000 | jam berikutnya |
| 12 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Securindo Packatama Indonesia. PT | Jl. Inspekti Saluran Kali Malarang No. 2 | DUREN SAWIT | DUREN SAWIT | 80 | 50 | 2000 | /2 jam 1 | 2000 | jam berikutnya |
| 13 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Securindo Packatama Indonesia. PT | Jl. Inspekti Kaimalangs No. 1 | PONDOK KELAPA | DUREN SAWIT | 80 | 50 | 2000 | jam 1 | 2000 | jam berikutnya |
| 14 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Hero Pondok Bambur PT. Hero Supermarket Tbk | Jl. Pahlawan Revolusi No. 10 | PONDOK BAMBUR | DUREN SAWIT | 150 | 200 | 1500 | jam 1 | 1500 | jam berikutnya |
| 15 | Charlies Lestari sentosa | Mal Citra Klender | Jl. Cusdi Ngurah Rai | DUREN SAWIT | DUREN SAWIT | 800 | 700 | 2000 | jam 1 | 2000 | jam berikutnya |
| 16 | Securindo Packatama Indonesia. PT | Pst. Perbelanjaan Kramat Jati | Jl. Raya Bogor Km 19 | KRAMAT JATI | KRAMAT JATI | 800 | 700 | 2000 | jam 1 | 2000 | jam berikutnya |
| 17 | PT. ISS Parking Management | Pubgading Trade Centre | Jl. Raya Bekasi cak. 2 | RAWA TERATE | CAKUNG | 500 | 150 | 2000 | jam 1 | 2000 | jam berikutnya |
| 18 | PT. ISS Parking Management | Pusat Grosir Cilitan | Jl. Mayjend Sutoyo No 76 | CULITAN | CULITAN | 650 | 1879 | 2000 | jam 1 | 2000 | jam berikutnya |
| 19 | PT. ISS Parking Management | Plaza Taman Modern | Jl. Raya Bekasi Km. 24 Jorong Menteng - Cakung | BUJUNG MENTENG | CAKUNG | 160 | 376 | 2000 | sekalı parkir | 500 | sekalı parkir |
| 20 | Batu Grogging Indah. PT | Perkantoran Puri Sentra Niaga | Jl. Seiawah Raya | CIPINANG MELAYU | MAKASAR | 140 | 80 | 2000 | sekalı parkir | 500 | sekalı parkir |
| 21 | Bukit Duni Plaza | Komplek Bukit Duni Plaza | Jl. Raya Jatnegara Barat No. 54 E | KAMPUNG MELAYU | JATINEGARA | 20 | 25 | 1000 | sekalı parkir | 200 | sekalı parkir |
| 22 | Koneptel Dinasti | Kop. Kantor Telkom | Jl. Di. Pahlawan | PAWA BUNGA | JATINEGARA | 40 | 60 | 500 | sekalı parkir | 200 | sekalı parkir |
| 23 | Ruko Cibubur Indah | Komplek Ruko Cibubur Indah | Jl. Lapangan Tembak Cibubur | CIBUBUR | CIRACAS | 100 | 50 | 1500 | jam 1 | 1500 | jam berikutnya |
| Sub Total | | | | | | 4458 | 5525 | | | | |

| NO. URUT | PERUSAHAAN | NAMA GEDUNG (LOKASI) | ALAMAT LOKASI PARKIR | KELURAHAN | KECAMATAN | SRP | | TARIF BIAYA PARKIR | | | |
|----------|---------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | MOBIL | MOTOR | TARIF DASAR (Rp.) | MOBIL TAMBAHAN (Rp.) | TARIF DASAR (Rp.) | MOTOR TAMBAHAN (Rp.) |
| 24 | Tamba Ria Jaya. PT | Komplek Rukan Taman Pondok Kelapa | Jl. Raya Pondok Kelapa | PONDOK KELAPA | DUREN SAWIT | 300 | 500 | 1500 /jam l | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 25 | Tanumah Indah. PT | Kawasan Industri PT. Tanumah Indah | Jl. Rawa Kepliling | RAWA TERATE | CAKUNG | 50 | | 2000 /jam l | 1500 /jam berikutnya | | |
| 26 | Yayasan Citra Handayani Utama | Gedung Cawang Kencana | Jl. Mayjend. Sutuyo Kav. 22 Cawang | CAWANG | KRAMAT JATI | 203 | 70 | 2000 /jam l | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 27 | Dharma Jaya. PD | Dharma Jaya. PD | Jl. Raya Penggilingan Cakung | PENGGILINGAN | CAKUNG | 50 | 100 | 2000 /jam l | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 28 | Nuansa Karya Kasih PT. | RS. Persahabatan | Jl. Persahabatan Raya | PISANGAN TIMUR | PULOGADUNG | 300 | 520 | 1500 2 jam l | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 29 | Gema Insani Pratama CV | Sed. Pusat Olah Raga Persahabatan Ind-Korea | Jl. Raya Cibubur | CIBUBUR | CIBUBUR | 50 | 100 | 1500 /jam l | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 30 | Anugerah Bina Karya PT. | RS. Mitra Internasional Jakarta/RS. Mitra Kalijaga | Jl. Jatinegara Timur | RAWA BUNGA | BALI MESTER | 180 | 80 | 1500 /jam l | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 31 | Kop. Kar RSUD Pasar Rebo | RSUD Pasar Rebo | Jl. TB. Simatupang | GEDONG | PASAR REBO | 51 | 100 | 1500 /jam l | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 32 | Kop. Karyawan "Berkah Mandiri" | RS. Islam Jak-Tim | Jl. Raya Pondok Kopi | MALAKA JAYA | DUREN SAWIT | 80 | 335 | 1500 /jam l | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 33 | PT. Reska Multi Usaha | Stasiun Jatinegara | Jl. Bekasi Barat | BALIMESTER | JATINEGARA | 36 | 87 | 1500 /jam l | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 34 | PT. Sismadi Giant Business Service | RS. Harum | Jl. Tanjung Barat | CIPINANG MELAYU | MAKASAR | 45 | 75 | 1500 /jam l | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 35 | PT. ISS Parking Management | RS. Omni Medical Central/RS. Chiglo Makro | Jl. Pulomas Barat VI | KAYUPUTIH | PULOGADUNG | 54 | 35 | 1500 /jam l | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 36 | Securundo Packatama Indonesia. PT | RS. Harapan Bunda | Jl. Raya Bogor | RAMBUTAN | CIRACAS | 95 | 30 | 1000 /jam l | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| 37 | PT. Hula Kirana Unjia dth Yayasan UKI | Kampus UKI | Jl. Mayjen Sutuyo | CAWANG | KRAMAT JATI | 150 | 350 | 1500 /jam l | 1000 /jam berikutnya | 500 /jam | |
| | Dipindahkan | | | | Sub Total | 1.644 | 2.382 | | | | |
| | | | | | Total | 6.102 | 7.907 | | | | |

TIMUR

| NO. | PERUSAHAAN | NAMA LOKASI | ALAMAT LOKASI | KELURAHAN | KECAMATAN | NAMA PENANGGUNGJAWAB | SRP | | TARIF BIAYA PARKIR | | |
|-----|--|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|-------|--------|--------------------|----------|----------------|
| | | | | | | | MOBIL | MOTOR | TARIF DASAR | TAMBAHAN | MOTOR TAMBAHAN |
| 38 | Pindahan PT. Securindo Packatama Indonesia | Cibubur Junction | Jl. Jambore No. 1 | Cibubur | Ciracas | Pindahan Tont Tjuatja q.d Daud Gozali | 6.102 | 7.907 | 2.000 | 2.000 | 500/jam |
| 39 | PT. Securindo Packatama Indonesia | Tamini Square | Jl. Taman Mini Raya | Pinang Rantai | Makassar | Tont Tjuatja | 1.000 | 1.200 | 2000 | 2000 | 500 |
| 40 | CV. Jaya Bersama | Tip Top Swalayan | Jl. Pahlawan Revolusi No.25 G | Pondok Bambu | Duren Sawit | Hert Wiryawan | 50 | 45 | 1000 | 1000 | 500 |
| 41 | Kop. Kar Usaha Pratama RS Haji Jakarta | RS Haji Jakarta | Jl. Raya Pondok Gede | Pinang Ranti | Makassar | Drg. Budi Utomo, MARS | 75 | 100 | 1500 | 1 x Pkr | 500 |
| 42 | Perorangan | An / H. Salamun | Jl. Raya Ciracas | Ciracas | Ciracas | H. Salamun | 30 | 72 | Tidak Memungut | | |
| 43 | PT. SPI | Plaza Buaran | Jl. Raden Inten No.1 | Klender | Duren Sawit | Tont Tjuatja | 343 | 1.550 | 2000 | 2000 | 500 |
| 44 | PT. Adiwira Sempurna | Mitra Matraman | Jl. Matraman Raya No.148 | Kbn Manggis | Matraman | Ricard Kosasih | 200 | 100 | 1500 | 1500 | 500 |
| 45 | PT. Bumiarto Kencana | Rawamangun Square | Jl. Pegambiran No. 55 | Jati | Pulo Gadung | Lanny Hermawan | 50 | 75 | 2000 | 2000 | 500 |
| 46 | Kop. Kar RSUD Budi Asih | RSUD Budi Asih | Jl. Dewi Sartika | Cawang | Kramatjati | H.M. Irawan, Skep | 79 | 200 | 1500 | 1000 | 500 |
| 47 | RSIA Hermina Jatinegara | RSIA Hermina Jatinegara | Jl. Raya Jatinegara Barat No. 126 | Jatinegara | Jatinegara | Dr. Syafrudin Nasution | 90 | 50 | Tidak Memungut | | |
| 48 | PT. Wahana Gelora Prestasi | Ujung Menteng Bisnis Center | Jl. Raya Bekasi KM.25 | Ujung Menteng | Cakung | Rudy Toran | 561 | 390 | 3000 | 2000 | 1000 |
| 49 | Perorangan | Komplek Ruko Cibubur Indah II | Jl. Lapangan Tembak Cibubur | Kelapa Dua Wetan | Ciracas | Lulu Syahindra | 5 | 40 | 6000 | 3000 | 500 |
| 50 | PT. Pan Satria Sakti | Pos Rawamangun | Jl. Pemuda No. 79 | Rawamangun | Cakung | Budy Hartono | 30 | 120 | 1500 | 1000 | 500 |
| 51 | PT. HDR Djasa Perkasa | Rukan Graha Mas | Jl. Pemuda | Jati | Pulo Gadung | Drs. H. Ms. Djaja Admadia | 188 | 250 | 2000 | 1000 | 500 |
| 52 | PT. Dinamika Mitra Pratama | Rukan Eksklusif Raden Inten | Jl. Raden Inten II No.80 | Duren Sawit | Duren Sawit | Erwin Manchakarta | 65 | 30 | 2000 | 1000 | 500 |
| | | | | | | Sub Total | 9.609 | 12.595 | | | |

| NO. | PERUSAHAAN | NAMA LOKASI | ALAMAT LOKASI | KELURAHAN | KECAMATAN | NAMA PENANGGUNGJAWAB | SRP | | TARIF BIAYA PARKIR | | | |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------------|-------|-------|--------------------|-----------|-------|-----------|
| | | | | | | | MOBIL | MOTOR | TARIF DASAR | TAMBAHAN | MOBIL | MOTOR |
| 53 | Yayasan Kes Kar Menteng Group | Hotel Mega Maitra | Jl. Matraman Raya No. 115 | Kbn Manggis | Matraman | Leonardo AR | 70 | 110 | 2000 | 2000 | 500 | 500 |
| 54 | Yayasan Kes Kar Menteng Group | Hotel Graha Menteng | Jl. Matraman Raya No. 21 | Kbn Manggis | Matraman | Leonardo AR | 65 | 150 | 2000 | 2000 | 500 | 500 |
| 55 | PT. Is Anwar Plaza | Ged. Is Plaza | Jl. Pramuka Raya Kav. 151 | Utari Kayu | Matraman | Iva Dewi Permata SH | 87 | 110 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 56 | PT. Catur Karda Depo Bangunan | Depo bangunan | Jl. Raya taruma barat no. 46 | Dm. Sawit | Dm. Sawit | Kambiyanto Kettin | 23 | 60 | 3000 | 1x Parkir | 1000 | 1x Parkir |
| 57 | PT. Bank BRI | Bank BRI Cab. JakTim | Jl. Olistia Raya | Jatinegara | Bidara Cina | Bambang Krismanto | 20 | 50 | Tidak Memungut | | | |
| 58 | PT. Centrepark Citra Corpora | RS. Bunda Aliyah | Jl. Pahl. Revolusi No. 100 | Pondok Bambu | Duren Sawit | Charles R. Oengkonono | 50 | 75 | 1500 | 1000 | 500 | 500 |
| 59 | PT. Kanunia Parking Ana Surya | RS. Bina Waiyua | Jl. TB Simatupang No. 71 Ciracas | Susukan | Ciracas | Gustiansyah D. Kameron | 42 | 20 | 1500 | 1000 | 500 | 500 |
| 60 | PT. Securindo Packatama Indonesia | Gading Icon Apartemen | Jl. Pennis Kemerdekaan Kav. 99 | Rawamangun | Pulogadung | Toni Tjuatja | 207 | 380 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 61 | PT. Krijaya Tika Mandiri | Gd. MT. Haryono Square | Jl. Olistia Raya | Bidara Cina | Cawang | Kanika Chandra SH | 180 | 150 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 62 | PT. Permana Persada Perwi | Grand Cakung | Jl. Sultan Hamengkubuwono IX Raya Bekasi Km. 25 | Ujung Menteng | Cakung | Kartasa | 53 | 103 | 2000 | 2000 | 500 | 500 |
| 63 | PT. Pembangunan Perumahan | Park Hotel Jakarta | Jl. Jend. Di. Panjaitan Kav. 5 | Cipinang Cempedak | Cawang | Sinurlinda Gustina | 60 | 20 | 2000 | 2000 | 500 | 500 |
| 64 | PT. Aksesindo Prima Lestari | RS. POLRI Dr. Sukanto | Jl. Raya Bogor Kramat Jati | Kramat Jati | Kramat Jati | H. Isnono SE | 120 | 200 | 1500 | 1000 | 500 | 500 |
| 65 | Perorangan | New Idola | Jl. Pramuka Raya No. 26 | Utari kayu utara | Matraman | Kosmos H | 12 | 20 | 2000 | | 500 | |
| 66 | PT. Dinamika Mitra Pratama | Gedung Pemuda | Jl. Pemuda No. 30 | Rawamangun | Rawamangun | Erwin Manchakaria | 72 | 80 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 67 | perorangan | Kolam Renang Tirta Mas | Jl. Pndk Kip | Pndk Kelapa | Dm Sawit | ishak | 20 | 100 | 1500 | 1000 | 500 | 500 |
| 68 | Kop. Kar. PT. Bank BCA Tbk | Gd. BCA Rawamangun | Jl. Ikan Paus Blok A. No. 81 | Pulo Gadung | Rawamangun | Sunardi SE | 28 | 50 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 69 | PT. Securindo Packatama Indonesia | MT. Haryono Residences | Jl. Olistia Raya No. 60 | Bidara Cina | Jatinegara | Toni Tjuatja | 88 | 64 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 70 | PT. Sinergi Cakra Sejahtera | RS. Yadika | Jl. Pahlawan Revolusi | Pondok Bambu | Duren Sawit | Ardiansyah | 55 | 105 | 1500 | 1000 | 500 | 500 |
| 71 | PT. Securindo Packatama Indonesia | Shopping Arcade Jakarta Garden City | Jl. Raya Cakung Cilincing KM.0.5 | Cakung | Pulogadung | Toni Tjuatja | 104 | 250 | 2000 | 1500 | 500 | 500 |
| 72 | PT. Balarung Citrajaya Sumbang | Hotel Balarung | Jl. Matraman Raya No. 19 | Utari kayu utara | Matraman | Irfyal Ismail | 41 | 37 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 |
| 73 | PT. Securindo Packatama Indonesia | Gree Terrace TMII | Jl. Pintu JGree Terrace TMII | Ceger | Cipayung | Toni Tjuatja | 220 | 500 | 5000 | 1x parkir | 2000 | 1x parkir |
| 74 | PT. Jakarta Surya Parking | RS Admiria | Jl. Kayu Putih Raya No. 1 | Kayu Putih | Pulo Gadung | Darmayati Manan | 40 | 25 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 |
| 75 | PT. SPI | Komplek Bassuro city | Jl. Basuki Rachmad No. 1A | Cipinang Bsr Sel | Jatinegara | Toni Tjuatja | 84 | 198 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 |
| 76 | PT. Sinergi Cakra Sejahtera | RS Harapan Jayakarta | Jl. Bekasi Tmr Raya No. 6 KM. 18 | Jatinegara Kaum | Cakung | Dra. Hartatiningsih Apt | 5 | 50 | 6000 | 1000 | 2000 | |
| 77 | PT. SPI | Jl. Mangga Dua Abdad No. 14 | Jl. Mangga Dua Abdad No. 14 | Pondok Bambu | Duren Sawit | Toni Tjuatja | 300 | 500 | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 |
| 78 | PT. Pokan Teknologi Bandung | Jl. Pemuda Raya No. 1 A | Jl. Pemuda Raya No. 1 A | Jatinegara Kaum | Pulogadung | Lili Supriyanto | 123 | 105 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 |

| NO. | PERUSAHAAN | NAMA LOKASI | ALAMAT LOKASI | KELURAHAN | KECAMATAN | NAMA PENANGGUNGJAWAB | SRP | | TARIF BIAYA PARKIR | | | | |
|-----|--|----------------------------|--|-------------------|-------------|--------------------------|-------|-------|--------------------|----------|-------------|----------|---------|
| | | | | | | | MOBIL | MOTOR | MOBIL | | MOTOR | | |
| | | | | | | | | | TARIF DASAR | TAMBAHAN | TARIF DASAR | TAMBAHAN | |
| 79 | PT. Intrub Business Park | Jl.Cililitan Besar No.454 | Graha Intrub | Kebon Pala | Makassar | Hungkang Sutedja | 163 | 258 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 1000 |
| 80 | PT. Charles Lestari Sentosa | Ramayana Klender | Jl.Raya Teratai Putih Malaka | Pondok Kopi | Duren Sawit | Iwan | 30 | 350 | 6000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 |
| 81 | PT. SPI | JL.MANGGADUA ABDAD NO.14 | Jakarta gams center jl.bekasi brt no.2 | Jatinegara | Jatinegara | toni tjuatja | 167 | 130 | 3000 | 3000 | 3000 | 1000 | 2000 |
| 82 | PT. Reska multi usaha | jl.bekasi timur | stasiun klender jl.bekasi timur | Klender | Klender | drs.noer hamidi m.s.i | 5 | 200 | 6000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 |
| 83 | PT. Reska multi usaha | JL.STASIUN CAKUNG | STASIUN CAKUNG JL.stasiun cakung | Cakung | Cakung | drs.noer hamidi m.s.i | - | 350 | - | - | - | 1000 | 1000 |
| 84 | PT. Reska multi usaha | JL.I.GUSTI NGURAH RAI | stasiun klender baru jl.i.gusti ngurah rai | Klender | Klender | drs.noer hamidi m.s.i | - | 200 | - | - | - | 1000 | 1000 |
| 85 | PT.ABK | JL.Raya jatiwaringin | naga swalayan jatiwaringin jl.raya jati | Cipinang melayu | makassar | sindhu sidharta | 8 | 50 | 3000 | 1 x pkr | 3000 | 2000 | 1 x pkr |
| 86 | PT.ABK | jl.raya bogor | naga swalayan ciracas jl.raya bogor | ciracas | ciracas | sindhu sidharta | 15 | 20 | 3000 | 1 x pkr | 3000 | 1000 | 1 x pkr |
| 87 | PT. Manggala wira pratama | jl.pisangan lama sel no.1 | psr induk cipinang jl.pisangan lama sel | Cipinang | pulogadung | eko amiarito | 705 | 310 | 3000 | 2000 | 3000 | 1000 | 1000 |
| 88 | PT. Angkasa Pura III Persero cabang baru | JL. PROTOKOL HALIM PK | Area Parkir Hpk | Halim | Makassar | Iwan khirshadianto | 685 | 703 | 3000 | 2000 | 3000 | 1000 | 1000 |
| 89 | PT Prima Jaya sukses mandiri | jl.raya cakung timur | Rusunawa Pulo Gebang | Pulo Gebang | Cakung | Winda Febriyanti | 40 | 120 | 3000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| 90 | PT Sumber jangkar mandiri | jl.Rawamangun muka tmr | UNJ | Rawamangun | Pulogadung | Hasan cokro | 250 | 1350 | 3000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| 91 | PT. SPI | jl. mangga dua abdad no.14 | Hotel Ibis Jakarta Cawang | Cawang | Kramat Jati | Tony tjuatja | 137 | 310 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 |
| 92 | PT. Wika Realty | jl.D.I.Panjaitan kav.3 - 4 | Taman Sari Hive | Cipinang Cempedak | Jatinegara | Ir Budisadewo soediro,mm | 188 | 99 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 |
| 93 | PT. SPI | jl. mangga dua abdad no.14 | jl.Raya bogor Km.22 no.44 /RS-Hasran Bunda | Kampung Rambutan | Ciracas | Toni tjuatja | 105 | 290 | 3000 | 2000 | 3000 | 1000 | 1000 |
| 94 | PT. Dinamika mitra pratama | jl. kelapa hijau 2 bdk kip | Green terrace kalimalang | Pondok Kelapa | Duren Sawit | erwin manchakarta | 316 | 300 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 |
| 95 | PT. Hoffman international parking | jl.D.I. Panjaitan no.48 | Rukan kirana cawang | Cipinang Cempedak | Jatinegara | Rudy Japarto | 50 | 75 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 2000 |
| | | | | | | | 5 | 5 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 |

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 102 TAHUN 2013
Tanggal 6 September 2013

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN
DENGAN MEMUNGUT BIAYA PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran;
16. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran;
18. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System;
21. Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN DENGAN MEMUNGUT BIAYA PARKIR.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir kepada penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nama Perusahaan :
- b. Nama Penanggung Jawab :
- c. Alamat Penanggung Jawab :
- d. Alamat Lokasi Parkir :
- e. Jenis Fasilitas Tempat Parkir :
- f. Pemanfaatan Fasilitas Parkir/
Jenis Kegiatan :
- g. Tarif Biaya Parkir : Mobil : Rp..... untuk jam pertama
Rp..... untuk setiap jam
berikutnya kurang dari 1 (satu)
jam dihitung 1 (satu) jam
Motor : Rp...../jam
Sepeda : Rp..... 1 (satu) kali parkir

h. Jumlah Satuan Ruang Parkir : Mobil :SRP
 (SRP) Motor :SRP
 Sepeda :SRP
 Parkir Vallet :SRP*
 *(paling banyak 10% dari total SRP)

- KEDUA : Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pengguna fasilitas parkir dan menjaga ketertiban, keamanan, kebersamaan dan kelancaran lalu lintas di tempat parkir dan lingkungan sekitarnya.
- KETIGA : Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menyediakan fasilitas parkir khusus bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil dan pengendara sepeda.
- KEEMPAT : Dalam hal penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN
 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
 DKI JAKARTA,

.....
 NIP

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 102 TAHUN 2013
Tanggal 6 September 2013

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN
DENGAN TIDAK MEMUNGUT BIAYA PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Tidak Memungut Biaya Parkir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran;
16. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran;
18. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System;
21. Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN DENGAN TIDAK MEMUNGUT BIAYA PARKIR.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Tidak Memungut Biaya Parkir kepada penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nama Perusahaan :
- b. Nama Penanggung Jawab :
- c. Alamat Penanggung Jawab :
- d. Alamat Lokasi Parkir :
- e. Jenis Fasilitas Tempat Parkir :
- f. Pemanfaatan Fasilitas Parkir/
Jenis Kegiatan :
- g. Jumlah Satuan Ruang Parkir : Mobil :SRP
(SRP) Motor :SRP
Sepeda :SRP

- KEDUA : Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pengguna fasilitas parkir dan menjaga ketertiban, keamanan, kebersamaan dan kelancaran lalu lintas di tempat parkir dan lingkungan sekitarnya.
- KETIGA : Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menyediakan fasilitas parkir khusus bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil dan pengendara sepeda.
- KEEMPAT : Dalam hal penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
DKI JAKARTA,

.....
NIP

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

CURRICULUM VITAE

Nama : Anggita Rachma Dewanti
Alamat : Jl. Kemang Timur I RT/RW 013/004, Jakarta Selatan. DKI Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 09 Desember 1993
Ibu : Mulyati
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Ayah : Herry Wibowo
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Pensiun)

PENDIDIKAN

TK : TK Islam Nur Muhammad
SD : SDN 07 Pagi Duren Tiga. Jakarta Selatan
SMP : SMP Negeri 124 Jakarta Selatan (2008)
SMA : SMA Negeri 24 Jakarta Pusat (2011)
KULIAH : Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2015)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Seni Rupa SMPN 124 Jakarta
2. Divisi Kesekretariatan di Koalisi Pemuda Hijau Indonesia (KOPHI)
3. Volunteer di KOPHI
4. PMII

KETERTARIKAN

1. Menggambar/ Melukis
2. Membaca
3. Kuliner